



Harian

JAYA POS

Perubahan Menuju Kemajuan **TERVERIFIKASI DEWAN PERS**

PEMBINA :
Letjend TNI (Purn) Dr. SUTIYOSO
Mayjen TNI (Purn) Dr. SAURIP KADI, S.E., MM., MBA.
Pendiri, Pemimpin Redaksi/ Penanggung Jawab :
TONI LIMBONG, SH.

REDAKSI:
Jl Komplek Depag Blok G2 No.83
RT012 RW003 Kelurahan Kedaung,
Kaliangke, Jakarta Barat,
Telp: (021) 23095745
Email: harianjayapos@yahoo.co.id

SENIN: EDISI 849 TAHUN XIX, 13-19 JULI 2026

www.harianjayapos.com

HARGA: @Rp.18.000,- LUAR JAWA + ONGKOS KIRIM

Sat Lantas Polres Way Kanan Gelar Blue Light Patrol, Cegah Kecelakaan dan Gangguan Kamtibmas

Way Kanan, Jaya Pos

Satuan Lalu Lintas (Sat Lantas) Polres Way Kanan kembali menggelar "Blue Light Patrol" untuk menjaga keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas (Kamseltibcarlantas) di wilayah hukumnya, Rabu (8/7/2026) malam.

Patroli dimulai pukul 20.30 WIB dengan menyasar sejumlah titik strategis, termasuk Simpang Empat

▶▶ Halaman 5



Satuan Lalu Lintas (sat Lantas) Polres Way Kanan Gelar Patroli Blue Light.(Dok Hms)

Pilkades Serentak di Mukomuko Dijadwalkan Oktober 2026, DPMD Kebut Revisi Perda

Mokomuko, Jaya Pos

Pemerintah Kabupaten Mukomuko melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) terus mempersiapkan pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) Serentak yang direncanakan berlangsung pada Oktober 2026. Salah satu langkah yang saat ini diprioritaskan adalah percepatan revisi Peraturan Daerah (Perda) sebagai landasan hukum pelaksanaan

▶▶ Halaman 5



Kantor DPMD Kab.Mukomuko. (Foto.Japri)

JEJAK KORUPSI BATU BARA DI RESTORAN PRANCIS, ASABRI & MISTERI NAMA JAMPIDSUS



Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Febrie Adriansyah

”
Kortas Tipidkor Polri menyita uang dan emas senilai lebih dari Rp500 miliar saat menggeledah sejumlah lokasi terkait penyidikan dugaan korupsi pasokan batu bara untuk PLTU, PT Asabri, dan PT Krakatau Steel.
“

Jakarta, Jaya Pos

Korps Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Kortas Tipidkor) Polri terus mengembangkan penyidikan sejumlah perkara dugaan korupsi besar. Dalam rangkaian penggeledahan di Jakarta Selatan hingga Kabupaten Bogor, penyidik menyita uang tunai dalam berbagai mata uang asing, emas batangan seberat puluhan kilogram, serta sejumlah dokumen dan barang elektronik. Total nilai barang bukti yang diamankan diperkirakan mencapai lebih dari Rp500 miliar. Penyidikan ini berkaitan dengan dugaan korupsi pemenuhan pasokan batu bara untuk Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU), perkara PT Asabri, PT Krakatau Steel, hingga dugaan tindak pidana pencucian uang (TPPU).

Pengeledahan menjadi salah satu langkah yang ditempuh penyidik untuk menelusuri aliran

▶▶ Halaman 5

KDM Turun Tangan Akhiri Polemik Jembatan Gantung Sukamenak

Ciamis, Jaya Pos

Setelah ramai di media sosial dan diberitakan Harian Jaya Pos dan japos.co, Jembatan Gantung Sukamenak seharga Rp 5 miliar yang menghubungkan Desa Wanasingra Kecamatan Sindangkasih Kabupaten Ciamis dengan Kelurahan Sukamenak Kecamatan Purbaratu Kota Tasikmalaya akhirnya kembali dibuka dan normal dilalui warga.

Sebelumnya, jembatan ini sempat viral karena ditutup total menggunakan rumpun bambu oleh Kepala Desa Wanasingra, Yudi Wahyudi. Penutupan tersebut dipicu protes terkait persoalan akses jalan dan lahan.

Merespons polemik ini, Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi akrab dipanggil Kang Dedi Mulyadi (KDM) turun langsung ke lokasi, Sabtu (4/7) untuk membuka kembali akses jembatan.



Jembatan Gantung Sukamenak yang menghubungkan Desa Wanasingra Kecamatan Sindangkasih Kabupaten Ciamis dengan Kelurahan Sukamenak Kota Tasikmalaya, kembali dapat dilalui masyarakat setelah dibuka oleh Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi. (Foto:Mamay)

Kepala Desa Wanasingra, Yudi Wahyudi, membenarkan pembukaan tersebut setelah dirinya menjelaskan alasan penutupan terkait masalah pembebasan lahan yang dinilai belum tuntas. "Betul, kemarin Pak Dedi Mulyadi datang

langsung ke lokasi dan jembatannya dibuka. Kami sempat menjelaskan kenapa jembatan itu ditutup. Pak Dedi meminta dari pihak desa untuk membuka dulu aksesnya. Nanti persoalan ini rencananya

▶▶ Halaman 5

AHY Buka Sinode Besar GPI 2026 di Simalungun, Tekankan Pentingnya Sinergi Bangun Bangsa

Simalungun, Jaya Pos

Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan RI, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), didampingi Bupati Simalungun Anton Achmad Saragih, membuka Sinode Besar Gereja Pentakosta Indonesia (GPI) Tahun 2026 di Gedung Rajawali, Kecamatan Siantar, Kabupaten Simalungun, Jumat (3/7/2026).

AHY membuka kegiatan tersebut usai menghadiri Rapat Kerja Nasional Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (APEKSI) di Medan.

Sinode Besar GPI 2026 mengusung tema "Mengambil Bagian Dalam Pertandingan Menguasai Diri untuk Mahkota Abadi" (1 Korintus 9:25) dengan subtema "Dalam Kompleksitas Global, Gereja Meningkatkan Pelayanan Spiritual dan Sosialnya."

Dalam sambutannya, AHY me-



Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan RI, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), didampingi Bupati Simalungun Anton Achmad Saragih, membuka Sinode Besar Gereja Pentakosta Indonesia (GPI) Tahun 2026 di Gedung Rajawali, Kecamatan Siantar, Kabupaten Simalungun, Jumat (3/7/2026).(Dok hms)

negaskan pembangunan nasional tidak dapat dilakukan pemerintah sendiri, melainkan membutuhkan kolaborasi seluruh elemen masyarakat, termasuk lembaga keagamaan, dunia usaha, akademisi, media, dan masyarakat sipil.

"Pemerintah pusat maupun daerah tidak bisa bekerja sendiri. Kita harus membangun sinergi agar tujuan besar meningkatkan kesejahteraan rakyat dapat terwujud," ujar AHY.

▶▶ Halaman 5

Dana LPJU Ketapang Rp 95 Juta: Dedi Sebut Rp30 Juta ke PPK, PPK Bantah untuk Kejaksaan

Ketapang, Jaya Pos

Kasus dugaan penipuan dan penggelapan dalam proyek pengadaan Lampu Penerangan Jalan Umum (LPJU) di Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat, memasuki babak baru. Perkara yang ditangani Polres Ketapang itu memunculkan dugaan adanya aliran dana kepada pejabat di lingkungan Dinas Perhubungan

(Dishub) Kabupaten Ketapang.

Dalam proses mediasi yang berlangsung di ruang penyidik Polres Ketapang beberapa waktu lalu, terduga pelaku berinisial Dedi Mofriadi ST mengaku menerima uang Rp95 juta dari korban berinisial R untuk pengadaan lampu LPJU. Dari jumlah tersebut, Dedi menyebut Rp30 juta telah diserahkan kepada Pejabat

Pembuat Komitmen (PPK) Dishub Kabupaten Ketapang, Mulyono.

Menurut pengakuan Dedi, penyerahan uang tersebut dilakukan berdasarkan keterangan yang diterimanya dari Mulyono. "Uang Rp30 juta itu saya serahkan kepada Mulyono. Menurut penjelasan Mulyono kepada saya, uang tersebut akan diberikan kepada oknum di Ke-

jaksaan Negeri Ketapang," ujar Dedi sebagaimana disampaikan dalam mediasi.

Pernyataan tersebut kemudian ditindaklanjuti penyidik Polres Ketapang. Mulyono dipanggil untuk diminta keterangan di hadapan penyidik. Pertemuan itu juga diha-

▶▶ Halaman 5

PENIPUAN KASUS KETAPANG SKANDAL DANA 95 JUTA
Dugaan penipuan LPJU Ketapang: PPK Dishub akui terima Rp30 Juta tapi dalih pinjaman.(dok ist)

Pentingnya Manajemen Keuangan Koperasi yang Sehat

Ciamis, Jaya Pos

Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perdagangan dan Perindustrian (DKUKMPP) Kabupaten Ciamis menegaskan pemahaman tata kelola dan manajemen keuangan adalah harga mati bagi pengurus maupun pengawas koperasi.

Karena itu, mereka melatih 35 perwakilan pengurus Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih (KDKMP) se Kabupaten Ciamis di salah satu Hotel di Ciamis, beberapa waktu lalu. Kemudian mereka juga

melakukan pembinaan kelompok koperasi soal laporan keuangan yang transparan.

Kepala DKUKMPP Kabupaten Ciamis, Dadan Wiadi mengatakan, pengurus KDKMP perlu meningkatkan pengetahuan dan wawasan soal manajemen koperasi. Apalagi soal tata kelola dan manajemen keuangan koperasi yang sehat.

Hal itu guna mendorong peningkatan pendapatan daerah melalui sektor koperasi yang aktif dan produktif. "Untuk memastikan



Kadis DKUKMPP Ciamis, Dadan Wiadi. (Foto:Mamay)

materi tersampaikan dengan baik dan yang praktis serta aplikatif, DKUKMPP Ciamis turut menggendeng Lapenkopda Kabupaten Ciamis serta Tim Pengawas Koperasi Internal dinas sebagai pemateri dan pendamping," kata Dadan.

Diakuinya, urusan administratif seperti laporan RAT kerap menjadi persoalan yang dianggap rumit. "Kami menyadari penyusunan laporan RAT seringkali dianggap rumit oleh sebagian pengurus. Oleh karena itu, kami mengadakan

kegiatan ini. Kami berharap melalui kegiatan ini, tidak ada lagi koperasi yang kesulitan dalam menyusun laporan RAT," ujarnya.

Dadan juga berpesan agar koperasi tidak perlu gengsi dan ragu untuk melangkah. Ia menyarankan agar usaha dimulai dari skala kecil dan dikelola dengan matang dari bawah. Sehingga dampaknya bisa langsung dirasakan oleh anggota. "Ini momentum untuk berdiskusi mengenai kendala teknis yang dihadapi di lapangan," pesannya.

(Mamay)

PT CJI Pasuruan Terus Berinovasi Melalui CJ Olimpiade Cetak Generasi Emas Berkualitas



Para pemenang Olimpiade kompetisi akademik yang diinisiasi PT Cheil Jedang Indonesia (CJI). (Foto: CJI)

Pasuruan, Jaya Pos

PT Cheil Jedang Indonesia (CJI) Pasuruan mewujudkan Kimitmentnya melalui Corporate Social Responsibility (CSR) dalam bidang pendidikan memiliki peran penting dalam mendukung dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM) sejak usia anak. Inilah yang menjadi alasan hadirnya program CJ Olimpiade dan Rumah Pintar yang dimiliki PT Cheil Jedang Indonesia (CJI) menjawab semua tantangan melahirkan generasi emas yang berkualitas.

Program ini menjadi pintu awal menuju investasi sosial jangka panjang dan membangun sumber daya manusia dari akar rumput. Perjalanannya tidak instan.

Dimulai dari menggelar olimpiade akademik, membentuk sekolah bola, hingga mendirikan Rumah Pintar. Semuanya demi menciptakan generasi emas Rejoso.

"Setiap kali ada rekrutmen karyawan, hasil tes masyarakat sekitar masih banyak yang di bawah standar. Dari situ kami mulai berpikir, jangan-jangan memang sejak awal akses pendidikannya yang terbatas," ujar Manager Public Relations PT CJI Pasuruan Slamet Wahyudi.

Jejak awal program dimulai pada bulan Juli 2025, PT CJI bekerja sama dengan Pondok Pesantren Al Istiqomah yang berada di Desa Toyaning.

Kerjasama ini melahirkan Rumah Pintar CJI. Rumah belajar mengajarkan keterampilan informasi teknologi (IT) dasar dan bahasa Inggris secara gratis bagi anak-anak tingkat SD hingga tingkat SMA.

Materi yang diajarkan sebatas materi sederhana. Meliputi mengenal komputer, belajar mengetik, hingga praktik Microsoft Office. Meski sebatas pembelajaran dasar, materi tersebut ternyata cukup diminati oleh anak-anak "Kami sempat kaget, banyak anak SMP yang belum pernah pegang laptop," ujar Slamet.

Sarana bantuan alat penunjang seperti komputer dan laptop berasal dari perusahaan, seperti laptop dan Personal Computer (PC).

Bahkan, beberapa adalah komputer eks kantor yang di-upgrade dan kini disulap menjadi alat belajar. Sehingga masih sangat layak digunakan belajar anak-anak.

PT CJI juga menerapkan pola belajar dalam setiap metode pembelajarannya. Salah satunya pembatasan kuota bagi peserta belajar. Kuotanya dibatasi 30 anak jenjang SD dan 30 anak tingkat SMP-SMA. "Biar fokus dan kualitas terjaga," jelas Slamet.

Asah Kemampuan Nonakademik Anak

SELAIN materi akademik, PT CJI juga menaruh perhatian pada pembelajaran nonakademik. Salah satunya pembinaan sepakbola yang berada di bawah naungan CJI Football Club (CJFC) yang berlangsung sejak tahun 1995.

Pembinaan cabang olahraga (cabor) sepakbola melibatkan anak-anak di sekitar lokasi perusahaan. Anak-anak dibina secara rutin. Dalam perjalanannya hingga kini terdapat 80 hingga 90 persen anak dari desa setempat terdaftar di CJFC. Hasil dari pembinaan cukup mengembirakan. Beberapa alumuninya bisa menembus klub profesional seperti Persekabpas.

Sedangkan di jalur pendidikan agama, PT CJI melaksanakan pendidikan rohani melalui Taman Pendidikan Alquran (TPQ) dan Madrasah Diniyah (Madin) yang rutin digelar setiap sore di Masjid Baiturrahman, Desa Arjosari. Di sana, lebih dari 100 anak belajar mengaji, hafalan surat, dan nilai-nilai akhlak.

Berikutnya seni bela diri, ada Perisai Diri CJ yang dilatih oleh pelatih bersertifikat. Jumlah pesertanya cukup mencengangkan. Lebih dari 200 anak dari berbagai desa di Kecamatan Rejoso. Prestasinya juga menembus level nasional, bahkan internasional. "Semuanya gratis. Pelatih, seragam, bola, bahkan air minum, kami yang tanggung. CSR ini bukan formalitas, tapi investasi jangka panjang," ujar Manager Public Relations PT CJI Pasuruan Slamet Wahyudi.

Hasil dari beragam pembinaan ini cukup mengembirakan. Dalam lima tahun terakhir, PT CJI telah menanamkan investasi cikal bakal generasi emas. Sederet program mulai dari pendidikan karakter, literasi digital, olahraga, dan spiritualitas diyakini akan melahirkan generasi unggul dan berkualitas.

Mungkin belum terasa hari ini. Namun, PT CJI yakin dan optimistis buahnya akan ranum di masa depan.

Di tengah industri yang kerap dituding membawa dampak lingkungan dan sosial, PT CJI mencoba membalik narasi itu. Dari pabrik, ilmu mengalir ke desa. Dan dari desa diharapkan tumbuh menjadi generasi masa depan. (wio)

DPRKPLH Ciamis Terima Bantuan 16 Kontainer Sampah dari Pemprov Jabar

Ciamis, Jaya Pos

Keberhasilan Kabupaten Ciamis dalam mempertahankan estetika dan kebersihan wilayahnya berbuah manis. Usai sukses menyabet penghargaan Makuta Binokasih, Pemkab Ciamis kini diguyur hadiah armada penunjang kebersihan berskala besar dari Pemerintah Provinsi Jawa Barat (Pemprov Jabar).

Makuta Binokasih merupakan bentuk apresiasi kepada daerah di Jabar, yang berkinerja terbaik dalam pengelolaan sampah serta kebersihan lingkungan.

Bantuan dari provinsi tersebut dalam bentuk deretan armada berat dan kendaraan operasional baru, guna mendongkrak sistem pengelolaan sampah di Tatar Galuh.

Plt Kepala Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup (DPRKPLH) Kabupaten Ciamis, Slamet Budi Wibowo, S.IP.,M.Si melalui Kabid Kebersihan DPRKPLH, Irwan Efendi mengatakan, bahwa seluruh amada saat ini tengah diproses dan dikirim secara bertahap. "Seluruh proses pengadaan dan kelang semuanya ada di provinsi. Kita di sini posisinya sebagai penerima manfaat saja. Namun barang dan fasilitas yang datang ini memang sesuai dengan ajuan kebutuhan kita di lapangan," katanya, Senin (6/7).

Menurutnya, armada kebersihan yang menjadi sorotan utama dalam bantuan ini adalah kedatangan alat-alat berat penunjang di Tempat Pembuangan Akhir (TPA). Seperti 2 unit bul-



Kabid Kebersihan DPRKPLH Ciamis, Irwan. (Foto:Mamay)

dosier, 2 unit ekskavator, 2 unit dump truck serta 2 unit truk amrol.

Dijelaskannya, selain alat berat tersebut, bantuan dari provinsi juga dilengkapi dengan pengiriman 16 unit kontainer sampah. Kemudian, 1 unit mobil pick up organik, serta 2 unit motor roda tiga.

Ditegaskannya, bahwa penambahan armada truk operasional yang baru bakal langsung dimaksimalkan. Hal itu untuk memperluas jangkauan layanan ke wilayah-wilayah kecamatan,

yang selama ini belum terlayani secara rutin oleh UPTD. "Saat ini ada 7 kecamatan yang memang belum rutin terlayani secara sistem atau belum MoU. Antara lain Jatinegara, Rajadesa, Rancah, Tambaksari, Sukadana, Cimaragas dan Cidolog. Selama ini sifatnya masih insidental, di mana mereka membawa sampah mandiri dan membayar retribusi langsung di TPA," tegas Irwan.

Dengan adanya armada tangguh, Irwan berharap para relawan serta

petugas kebersihan di lapangan bisa semakin termotivasi. Petugas juga lebih giat bekerja, karena fasilitas operasional mereka kini jauh lebih memadai.

Kendati fasilitas penunjang terus dipenuhi oleh pemerintah, Irwan tetap menghimbau masyarakat untuk menjadi garda terdepan dalam menjaga keasrian lingkungan. Budaya menjaga kebersihan harus tetap mengakar kuat di tengah warga Ciamis.

(Mamay)

DPRD Pasuruan Mulai Bahas Standar Harga untuk APBD 2027, Pastikan Belanja Daerah Lebih Efisien

Pasuruan, Jaya Pos

Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pasuruan mulai menyusun kerangka Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2027. Salah satu fokus pembahasan adalah penyesuaian Standar Satuan Harga (SSH) sebagai acuan penyusunan anggaran agar belanja daerah lebih realistis, efisien, dan sesuai ketentuan.

Pembahasan tersebut dilakukan melalui rapat konsultasi antara pimpinan DPRD Kabupaten Pasuruan dengan Tim Standar Satuan Harga (SSH) yang melibatkan sejumlah organisasi perangkat daerah (OPD).

Ketua DPRD Kabupaten Pasuruan, Samsul Hidayat, mengatakan pembahasan SSH



Ketua DPRD Kabupaten Pasuruan, Samsul Hidayat (dok Hms)

merupakan tahapan penting dalam proses penyusunan APBD karena akan menjadi dasar penyusunan berbagai dokumen perencanaan dan penganggaran daerah, mulai dari Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), Rencana

Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA-SKPD), Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA-SKPD), hingga APBD.

Menurutnya, setiap standar harga yang ditetapkan harus memiliki dasar hukum

yang jelas agar pelaksanaan anggaran dapat dipertanggungjawabkan dan terhindar dari potensi penyimpangan.

Ia mencontohkan penetapan harga paket konsumsi dalam kegiatan pemerintahan. Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2025 tentang Standar Harga Satuan Regional (SHSR), harga nasi kotak berada pada kisaran Rp35 ribu hingga Rp50 ribu per paket.

Namun, Pemkab Pasuruan menetapkan harga sebesar Rp40 ribu per paket melalui Peraturan Bupati sebagai acuan pelaksanaan kegiatan. "Yang jelas, penentuan standar harga satuan kegiatan di lingkungan pemerintah daerah maupun Sekretariat DPRD harus memiliki payung hu-

kum, baik melalui peraturan daerah maupun peraturan bupati," tegasnya.

Sementara itu, Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Kabupaten Pasuruan, Yuswianto, mengatakan penyusunan SSH untuk APBD 2027 mengalami sejumlah penyesuaian dibandingkan tahun sebelumnya.

Ia menjelaskan, penerapan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) mengharuskan setiap pemerintah daerah memiliki basis data Standar Satuan Harga (SSH), Analisis Standar Belanja (ASB), Standar Biaya Umum (SBU), serta Harga Satuan Pokok Kegiatan (HSPK) yang valid, terintegrasi, dan dapat dipertanggungjawabkan.

(Wio)

Bupati Apresiasi P3A Dan GP3A Mitra Cai, Berperan Vital Dalam Peningkatan Produksi Pertanian

Sukabumi, Jaya Pos

Bupati Sukabumi H. Asep Japar mengapresiasi keberadaan Perkumpulan Petani Pemakai Air (P3A) dan Gabungan Perkumpulan Petani Pemakai Air (GP3A) Mitra Cai. Menurutnya, keberadaannya sangat vital dalam peningkatan produksi hasil pertanian di Kabupaten Sukabumi.

"Kami meraih juara dua nasional terkait swasembada pangan, salah satunya berkat peran para petani dan mitra cai ini," ujarnya saat membuka Pelatihan Penguatan Peran Serta P3A dan GP3A Mitra Cai Dalam rangka pengelo-

laan jaringan irigasi secara partisipatif dan berkelanjutan pada daerah irigasi kewenangan Kabupaten Sukabumi di Situ Sukarame, Kecamatan Parakansalak, Selasa, 7 Juli 2026.

Oleh karena itu, peran mitra cai sangat jelas bagi pertanian dalam mengalirkan air dari irigasi ke sawah para petani.

"Kalau mitra cai tak ada bagaimana, petani nasibnya," ucapnya.

Oleh karena itu, dirinya berharap mitra cai dapat terus semangat. Sehingga, masyarakat Sukabumi bisa bertani sesuai harapan.



Bupati Sukabumi H.Asep Japar(Tengah) bersama Kadis PU Uus Firdaus (Rompi Kuning). (Foto/Ist)

"Di sini, nanti para mitra cai bisa berbagi pengalaman," ungkapnya

Di momen itu juga, bupati

telah menyiapkan berbagai upaya antisipasi musim kemarau. Salah satunya dengan pemetaan daerah yang rawan

kekeringan saat kemarau.

"Kami mencoba mengantisipasi melalui sumur bor untuk membantu pertanian," bebernya.

Sementara itu, Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Sukabumi Uus Pirdaus mengatakan, sekitar 150 P3A Mitra Cai berkumpul dari berbagai wilayah. Mereka akan diberikan pengetahuan untuk penguatan P3A pengelolaan jaringan irigasi secara partisipatif.

"P3A ini punya peran penting yang berkaitan irigasi. Sehingga perlu bersinergi secara masif dan berkelanjutan," pungkasnya. (Yud)

SMP Negeri 2 Ciamis Ukir Prestasi Pada Ajang O2SN Tingkat Kabupaten Ciamis 2026



Kepsek SMPN 2 Ciamis, H. Amar bersama Alta Zhafran Khairy dan Arya Hubbanirrahman peraih piala pada ajang Olimpiade Sains Nasional 2026. (Foto:Mamay)

Ciamis, Jaya Pos

Prestasi membanggakan kembali ditorehkan oleh SMP Negeri 2 Ciamis dalam ajang Olimpiade Olahraga Siswa Nasional (O2SN) tingkat Kabupaten Ciamis Tahun 2026, sekolah tersebut berhasil meraih Juara Umum I cabang olahraga renang kategori putra atas nama Dhafir Akmal Mumtaz dan berhak mewakili daerah ke tingkat Provinsi Jawa Barat.

Selain itu, Raisa Nadira Setiawandiasastra kelas 8F meraih Juara I Panjat Tebing dan Alta Zhafran Khairy kelas 7B serta Arya Hubbanirrahman kelas 7C meraih Juara I dalam kejuaraan Olimpiade Sains Nasional mata pelajaran IPA.

Kepala SMPN 2 Ciamis, H. Amar, S.Pd., M.Pd., mengungkapkan, rasa syukur dan bangganya atas capaian yang diraih para siswa dalam ajang bergengsi tersebut. "Alhamdulillah, dalam O2SN tingkat Kabupaten Ciamis, SMPN 2 Ciamis berhasil meraih Juara Umum I cabang olahraga renang untuk kategori putra sehingga berhak mewakili ke tingkat provinsi selain Raisa Nadira Setiawandiasastra kelas 8F meraih Juara I Panjat Tebing dan Alta Zhafran Khairy kelas 7B serta Arya Hubbanirrahman kelas 7C meraih Juara I dalam kejuaraan Olimpiade Sains Nasional mata pelajaran IPA," ungkap H. Amar, Rabu (8/7).

Ajang O2SN tersebut digelar di SMP Negeri 1 Banjarsari, Kabupaten Ciamis dan diikuti oleh para siswa terbaik dari berbagai sekolah yang sebelumnya telah melalui proses seleksi berjenjang.

Menurut H. Amar, para atlet yang bertanding merupakan siswa kelas VIII yang telah menunjukkan kemampuan dan potensi luar biasa sejak tahap seleksi di tingkat komisariat hingga tingkat kabupaten. "Prestasi ini diraih oleh siswa-siswi kelas VIII. Mereka sebelumnya kami kirim sebagai utusan dari tingkat komisariat, kemudian mengikuti seleksi dan kompetisi di tingkat kabupaten. Alhamdulillah hasilnya sangat membanggakan. Untuk saat ini kami tinggal menunggu jadwal pelaksanaan O2SN tingkat provinsi," ujarnya.

Ditegaskannya, bahwa keberhasilan tersebut tidak terlepas dari kerja keras para siswa, dukungan orang tua, serta pembinaan yang dilakukan oleh guru dan pelatih. Prestasi ini juga menjadi bukti bahwa peserta didik SMPN 2 Ciamis tidak hanya mampu berprestasi di bidang akademik, tetapi juga di bidang olahraga. "Saya berharap capaian tersebut dapat menjadi motivasi bagi seluruh siswa untuk terus mengembangkan potensi yang dimiliki. Prestasi yang diraih hari ini harus dijadikan sebagai langkah awal untuk meraih keberhasilan yang lebih besar di masa mendatang. Kami sampaikan kepada anak-anak bahwa prestasi ini harus dijadikan sebagai langkah awal menuju masa depan yang lebih baik. Kalian adalah calon generasi emas Indonesia tahun 2045. Prestasi yang kalian torehkan hari ini jadikan sebagai pijakan untuk meraih prestasi-prestasi yang lebih tinggi di masa yang akan datang," tegas H. Amar.

Kepada siswa lain yang belum memperoleh kesempatan meraih prestasi, agar tidak berkecil hati dan tetap bersemangat dalam belajar maupun berlatih. "Bagi siswa yang belum memperoleh prestasi, jangan menyerah. Mulailah dari sekarang untuk belajar lebih giat, memperkuat tekad, meningkatkan disiplin, dan terus berlatih sesuai bidang yang diminati. Kesuksesan tidak datang secara instan, tetapi melalui proses yang panjang dan penuh perjuangan," pesan H. Amar.

Diungkapkannya, semangat kompetitif yang sehat perlu terus ditanamkan kepada para siswa sebagai bekal menghadapi tantangan di masa depan. Dengan kerja keras, disiplin dan kemauan untuk terus berkembang, setiap siswa memiliki peluang yang sama untuk meraih prestasi.

Kini, seluruh keluarga besar SMPN 2 Ciamis menantikan perjuangan para pelajar yang akan membawa nama sekolah dan daerah pada ajang O2SN tingkat Provinsi Jawa Barat. Dukungan dan doa terus mengalir agar para atlet mampu memberikan hasil terbaik serta mengharumkan nama Kabupaten Ciamis di tingkat yang lebih tinggi.

Sebelumnya, berdasarkan pantauan tim japos.co, Olimpiade Olahraga Siswa Nasional (O2SN) jenjang SMP tingkat Kabupaten Ciamis Tahun 2026 resmi dibuka di SMPN 1 Banjarsari, Rabu (20/5). Kegiatan tersebut dibuka Sekretaris Dinas Pendidikan Kabupaten Ciamis, Muharram Ahmad Jazuli, mewakili Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Ciamis.

Pembukaan berlangsung meriah dengan penampilan marching band SMPN 1 Banjarsari "Getra Mandala" yang menyambut para peserta dan tamu undangan. O2SN tingkat SMP tahun ini diikuti kontingen dari enam komisariat se-Kabupaten Ciamis yang terdiri dari sekolah negeri maupun swasta.

Ketua panitia pelaksana dalam laporannya menyampaikan terdapat tujuh cabang olahraga yang dipertandingkan dalam kegiatan tersebut, yakni atletik, bola basket, bola voli, pencak silat, renang, panjat tebing, dan bulu tangkis. Seluruh pertandingan dilaksanakan di lima venue berbeda dengan jumlah peserta mencapai sekitar 300 siswa.

Dalam sambutannya, Muharram menegaskan O2SN bukan sekadar ajang kompetisi untuk meraih kemenangan, tetapi juga menjadi sarana pembinaan karakter dan pengembangan bakat peserta didik.

Muharram juga berpesan kepada seluruh peserta agar mengikuti perlombaan dengan penuh semangat dan tetap menjunjung tinggi sportivitas. "Menang ataupun belum menjadi juara bukanlah tujuan utama. Yang lebih penting adalah bagaimana kalian mampu menunjukkan sikap disiplin, kejujuran, kerja keras, dan rasa hormat kepada sesama peserta maupun para wasit dan juri," pungkasnya. (Mamay)

Bupati Mojokerto Serahkan Bantuan Sosial Pembangunan Rutilahu kepada Korban Kebakaran di Desa Sidorejo

Mojokerto, Jaya Pos

Pemerintah Kabupaten Mojokerto terus menunjukkan komitmennya dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat, salah satunya melalui Program Rumah Tinggal Layak Huni (Rutilahu). Program tersebut menjadi bentuk nyata kepedulian pemerintah daerah dalam menyediakan hunian yang aman, sehat, dan layak bagi warga yang membutuhkan.

Komitmen tersebut diwujudkan dengan penyerahan bantuan sosial pembangunan rumah tidak layak huni (Rutilahu) secara langsung oleh Bupati Mojokerto, Muhammad Al Barra, kepada pasangan Kaspan dan Misri, warga Desa Sidorejo, Kecamatan Jatis, Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur.

Bantuan pembangunan rumah tersebut diberikan setelah kediaman pasangan tersebut mengalami musibah kebakaran yang mengakibatkan rumah mereka tidak lagi layak dihuni.

Dalam penyerahan bantuan, Bupati Mojokerto didampingi Kepala Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Perhubungan Bambang Purwanto, jajaran Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Kabupaten Mojokerto, Perumdam Mojopahit, Camat Jatis, serta Kepala Desa Sidorejo.

Pada kesempatan itu, Bupati Muhammad Al Barra menjelaskan bahwa pembangunan rumah tersebut merupakan hasil kolaborasi antara Baznas Kabupaten Mojokerto dan Perumdam Mojopahit



Bupati saat menyerahkan bantuan Rutilahu di Kecamatan Jatis. (Dok Ad)

melalui skema pembiayaan bersama. Sinergi antar lembaga tersebut menjadi wujud kepedulian bersama dalam membantu masyarakat yang membutuhkan hunian layak.

"Rumah warga ini sebelumnya mengalami musibah kebakaran dan kondisinya memang sudah tidak layak huni. Alhamdulillah, Baznas bersama Perumdam Mojopahit dapat berkolaborasi melalui sharing anggaran untuk membangun kembali rumah Bapak Kaspan dan Ibu Misri sehingga dapat kembali ditempati dengan nyaman," ujar Bupati.

Menurutnya, Program Ru-

tilahu merupakan salah satu program prioritas Pemerintah Kabupaten Mojokerto dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat melalui penyediaan rumah yang layak huni.

Ia menegaskan bahwa pemerintah daerah akan terus melanjutkan program tersebut karena masih terdapat sejumlah rumah warga yang membutuhkan perbaikan.

"Masih ada rumah-rumah tidak layak huni di Kabupaten Mojokerto yang akan menjadi bagian dari program pemerintah daerah. Kami berharap melalui program ini semakin banyak masyarakat yang dapat memiliki tempat

tinggal yang aman, sehat, dan nyaman," katanya.

Suasana haru mewarnai prosesi penyerahan bantuan tersebut. Keluarga penerima bantuan tampak tidak kuasa menahan rasa syukur atas perhatian yang diberikan pemerintah.

Karomah, menantu pasangan Kaspan dan Misri yang mewakili keluarga, menyampaikan apresiasi dan ucapan terima kasih kepada Pemerintah Kabupaten Mojokerto, Baznas Kabupaten Mojokerto, serta Perumdam Mojopahit yang telah membantu membangun kembali rumah keluarganya.

"Dengan dibangunnya

rumah ini, kami sekeluarga mengucapkan terima kasih kepada Bapak Bupati, Baznas, dan Perumdam Mojopahit. Matur suwun sanget atas bantuan yang telah diberikan. Semoga Allah membalas semua kebaikan ini," ungkapnya penuh haru.

Program Rutilahu diharapkan dapat terus memberikan manfaat bagi masyarakat berpenghasilan rendah maupun warga yang terdampak bencana, sehingga kualitas kehidupan masyarakat Kabupaten Mojokerto semakin meningkat melalui tersedianya hunian yang layak, sehat, dan aman. (Ad)

Jelang Tahun Ajaran Baru

Toko Buku dan Pakaian Diserbu Masyarakat

Banjar, Jaya Pos

Menjelang masuknya tahun ajaran baru sekolah, warga di Kota Banjar, mulai memadati tempat perbelanjaan untuk berburu pakaian dan perlengkapan sekolah. Momen tahun ajaran baru masuk sekolah ini pun berdampak positif terhadap meningkatnya omzet pedagang buku dan pakaian sekolah.

Salah seorang warga, Popon mengaku berbelanja perlengkapan sekolah seperti baju seragam dan sepatu serta buku untuk persiapan anaknya yang sekarang hendak masuk sekolah.

Ia pun mengaku bahagia menyiapkan kebutuhan sekolah anaknya meski harus memikirkan biaya untuk kebutuhan sekolah tersebut.



Sejumlah warga di Kota Banjar menyerbu salah satu toko buku seiring akan dibukanya tahun ajaran baru. (Foto:Mamay)

"Beli seragam buat anak sekolah SMP. Perasaannya cam-pur aduk ya, mau nggak mau lah harus diadain uangnya buat belanja seragam sekolah serta perlengkapan sekolah," kata Popon, Kamis (9/7).

Salah satu karyawan toko

Kurnia, Jajang, mengatakan, permintaan pakaian seragam sekolah mulai meningkat sejak masa hari libur sekolah tepatnya pertengahan bulan Juni lalu.

Adapun stok pakaian dan perlengkapan sekolah yang

tersedia di toko cukup lengkap. Mulai dari kaos kaki, kerudung, dasi dan seragam anak sekolah tingkat SD hingga SMA. "Alhamdulillah untuk tahun ini dari awal bulan pertengahan bulan Juni sampai sekarang ini kita sudah banyak peningkatan," katanya.

Permintaan warga untuk kebutuhan seragam dan perlengkapan sekolah meski akan terjadi lonjakan hingga memasuki tahun ajaran baru pada 15 Juli mendatang. "Insyaallah optimis permintaan belanja seragam sekolah bisa lebih meningkat dan tahun ini bisa lebih baik lagi," kata Jajang.

Tak hanya seragam sekolah, warga juga mulai memadati toko buku dan alat

tulis sekolah untuk persiapan memasuki tahun ajaran baru. Salah satunya toko buku di kawasan Pasar Kota Banjar.

Pemilik toko, Hj. Yeyet, mengatakan, saat ini lonjakan pembeli buku untuk kebutuhan sekolah sudah mulai meningkat meski permintaan sedikit menurun dibandingkan tahun lalu.

Pada tahun lalu, dua minggu sebelum masuk sekolah sudah ada lonjakan pembeli. Warga yang berbelanja juga penuh sejak pagi sampai sore hari, namun sekarang hanya bertahan sampai pukul 13.30 Wib. "Lumayan sudah mulai ramai meski nggak seperti tahun lalu. Untuk potensi lonjakan kemungkinan nanti H-2 dan H-3 jelang masuk sekolah," pungkasnya. (Mamay)

Herdiat Apresiasi Berdirinya ARAS

Ciamis, Jaya Pos

Bupati Ciamis, H. Herdiat Sunarya memberikan apresiasi tinggi atas berdirinya Akademi Reforma Agraria Sejati (ARAS) Siti Halimah di Desa Kalijaya Kecamatan Banjaranyar. Menurutnya, kehadiran lembaga pendidikan tersebut menjadi tonggak penting dalam memperkuat perjuangan reforma agraria sekaligus meningkatkan peran perempuan dalam mewujudkan ketahanan pangan nasional.

Pernyataan tersebut disampaikan Herdiat saat menghadiri peresmian Akademi Reforma Agraria Sejati (ARAS) Siti Halimah yang dirangkaikan dengan Deklarasi Perempuan Pejuang Agraria Jawa Barat di Gedung ARAS Siti Halimah, Desa Kalijaya, Banjaranyar, Kamis (2/7).

Dalam sambutannya, Bupati Ciamis menyampaikan ucapan selamat dan apresiasi setinggi-tingginya kepada Serikat Petani Pasundan (SPP) atas ber-

dirinya gedung ARAS Siti Halimah di Kabupaten Ciamis. Ia menilai kehadiran akademi tersebut merupakan bukti nyata komitmen dalam memperjuangkan keadilan agraria melalui pendidikan dan penguatan kapasitas masyarakat, khususnya kaum perempuan. "Momentum hari ini bukan hanya milik warga Ciamis, tetapi menjadi bagian dari gerakan kolektif serta simbol solidaritas perjuangan agraria di tingkat regional maupun nasional," ujar Herdiat.

Dijelaskannya, pemilihan nama Siti Halimah memiliki makna yang sangat mendalam. Nama tersebut mencerminkan keteguhan, keberanian, serta dedikasi perempuan dalam memperjuangkan hak-hak agraria dan menjaga kedaulatan pangan.

Herdiat mengaku bangga karena Kecamatan Banjaranyar kini resmi menjadi pusat pendidikan dan pelatihan perempuan pejuang reforma agraria di Indone-



Bupati Ciamis, Herdiat Sunarya hadir peresmian Akademi Reforma Agraria Sejati (ARAS) Siti Halimah yang dirangkaikan dengan Deklarasi Perempuan Pejuang Agraria Jawa Barat di Gedung ARAS Siti Halimah, Desa Kalijaya Banjaranyar. (Foto:Mamay)

sia. Menurutnya, hal tersebut menjadi kebanggaan tersendiri bagi Kabupaten Ciamis. "Kami sangat bangga karena Ciamis dipercaya menjadi pusat pendidikan perempuan pejuang reforma agraria. Ini membuktikan bahwa tanah Ciamis merupakan tanah yang subur bagi lahirnya gagasan-gagasan progresif dan gerakan kemanusiaan yang berkeadilan," jelas Herdiat.

Dalam kesempatan itu, Herdiat menegaskan bahwa reforma agraria dan ketahanan pangan merupakan dua hal yang tidak dapat dipisahkan. Keadilan dalam penguasaan dan pemanfaatan lahan, menurutnya, menjadi fondasi utama dalam menciptakan sistem pangan yang kuat dan berkelanjutan.

Bupati Ciamis menaruh perhatian besar terhadap

peran perempuan dalam sektor pertanian. Ia menilai perempuan petani selama ini menjadi pilar yang sangat kokoh dalam menjaga keberlangsungan pangan, meski kerap kurang mendapatkan perhatian.

Keberadaan ARAS Siti Halimah, tandas Herdiat, memiliki nilai strategis sebagai pusat pendidikan dan pelatihan yang akan melahirkan perempuan-perempuan pejuang agraria yang tangguh, berpengetahuan dan mampu menjadi penggerak perubahan di tengah masyarakat.

"Saya berharap akademi tersebut menjadi kawah candradimuka bagi lahirnya kader-kader perempuan yang tidak hanya memperjuangkan keadilan agraria, tetapi juga mampu memperkuat ketahanan pangan, meningkatkan kesejahteraan petani, serta mendorong terwujudnya pembangunan pertanian yang berkelanjutan," tandasnya.

(Mamay)

Bupati Labusel Pimpin Rapat Bersama Forkopimda dan Stakeholder, Matangkan Persiapan Pemilihan Kepala Desa

Labusel, Jaya Pos

Bupati Labuhanbatu Selatan, Fery Sahputra Simatupang, memimpin rapat koordinasi bersama unsur Forkopimda dan berbagai pemangku kepentingan dalam rangka memantapkan persiapan pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa (Pilkades), Rabu (8/7/2026).

Kegiatan yang dilaksanakan secara virtual melalui Zoom Meeting tersebut diikuti oleh Wakil Bupati Labuhanbatu Selatan Syaahid Purba Siboro, unsur Forkopimda, Sekretaris Daerah M. Reza Pahle-

vi Nasution, para asisten, staf ahli, pimpinan OPD terkait, serta menghadirkan narasumber dari BRIN, Prof. Dr. Andrari Grahitudaru, M.Sc., yang memberikan pemaparan mengenai berbagai aspek penyelenggaraan Pilkades.

Rapat koordinasi ini menjadi forum untuk menyamakan persepsi sekaligus memperkuat sinergi antarinstansi dalam mempersiapkan seluruh tahapan penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa agar nantinya dapat berlangsung sesuai ketentuan peraturan perun-



Bupati Labuhanbatu Selatan Saat Ikuti Rapat Persiapan Pemilihan Kepala Desa. (Foto Toni)

dang-undangan, tertib, aman, dan kondusif.

Dalam arahannya, Bupati Fery Sahputra Simatupang menegaskan bahwa seluruh perangkat daerah dan pemangku kepentingan harus membangun koordinasi yang kuat sejak dini agar setiap tahapan persiapan dapat berjalan secara matang dan terencana.

Menurut Bupati, berbagai perkembangan kebijakan yang disampaikan oleh kementerian, termasuk pemanfaatan teknologi dalam penyelenggaraan Pilkades,

menjadi bahan masukan yang perlu dipelajari dan dipersiapkan bersama sesuai dengan regulasi yang akan ditetapkan pemerintah.

Selain itu, koordinasi dengan pemerintah pusat, Pemerintah Provinsi Sumatera Utara, Forkopimda, aparat keamanan, serta seluruh stakeholder akan terus diperkuat guna memastikan setiap tahapan pelaksanaan Pilkades berjalan dengan baik serta tetap mengedepankan prinsip transparansi, akuntabilitas, dan kepastian hukum. (T)

HUT ke-26 APKASI di Deli Serdang Berakhir



Direktur Eksekutif APKASI, Sarman Simanorang, yang didampingi jajarannya. (Dok Hms)

Lubuk Pakam, Jaya Pos

Rangkaian peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-26 Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (APKASI) yang dipusatkan di Kabupaten Deli Serdang resmi berakhir. Jajaran APKASI memberikan apresiasi atas suksesnya penyelenggaraan kegiatan yang dinilai memiliki koordinasi, kolaborasi, dan kualitas pelaksanaan terbaik.

Selama tiga hari, 1-3 Juli 2026, sejumlah agenda digelar, mulai dari "Welcome Dinner", Forum Bisnis Daerah (Forbisda), "Women's Program", Grand Final Pemilihan Putri Otonomi Indonesia (POI) 2026, hingga "fun walk".

Direktur Eksekutif APKASI, Sarman Simanorang, menyampaikan terima kasih kepada Pemerintah Kabupaten Deli Serdang beserta seluruh pihak yang telah mendukung suksesnya seluruh rangkaian kegiatan.

"Alhamdulillah seluruh rangkaian kegiatan APKASI telah selesai. Koordinasi yang dibangun sangat responsif dan komunikasi berjalan dengan baik. Kalaupun ada kendala di lapangan, semuanya bisa diatasi dengan cepat," ujar Sarman saat temu pami di Kantor Bupati Deli Serdang, Jumat (3/7/2026).

Menurutnya, penyelenggaraan HUT ke-26 APKASI di Deli Serdang menjadi salah satu yang paling meriah dan layak dijadikan acuan bagi daerah yang akan menjadi tuan rumah berikutnya.

"Dari sisi penyelenggaraan, ini yang paling meriah. Kami berharap ini bisa menjadi standar bagi penyelenggara selanjutnya. Terima kasih kepada seluruh jajaran Pemerintah Kabupaten Deli Serdang yang telah bekerja keras sehingga puncak HUT ke-26 APKASI yang bertepatan dengan HUT Kabupaten Deli Serdang berjalan dengan sangat baik," katanya.

Deli Serdang juga mencatat sejarah dalam ajang Putri Otonomi Indonesia 2026. Untuk pertama kalinya, daerah tuan rumah berhasil meraih gelar juara melalui wakilnya, Yemima Mutiara Caren Sitanggang. Selain itu, penyelenggaraan tahun ini juga menghadirkan agenda "retreat" bagi para finalis.

"Sepanjang penyelenggaraan Putri Otonomi Indonesia, baru kali ini tuan rumah berhasil menjadi juara. Ini menjadi catatan yang membanggakan bagi Deli Serdang," ujar Sarman.

Sementara itu, Wakil Bupati Deli Serdang menyampaikan rasa syukur atas suksesnya seluruh rangkaian kegiatan. Menurutnya, keberhasilan tersebut merupakan hasil koordinasi dan kolaborasi yang baik antara panitia daerah dan tim APKASI.

"Dalam beberapa hari terakhir koordinasi dan kolaborasi berjalan sangat baik. Kami merasa bangga dapat bekerja bersama tim APKASI. Jika selama pelaksanaan masih ada pelayanan yang kurang maksimal, kami menyampaikan permohonan maaf," katanya.

Bupati Deli Serdang Asri Ludin Tambunan juga mengaku bersyukur seluruh agenda yang telah dipersiapkan sejak awal dapat terlaksana dengan baik meski sempat menghadapi sejumlah tantangan.

Menurutnya, HUT APKASI bukan sekadar kegiatan seremonial, tetapi menjadi wadah strategis bagi pemerintah kabupaten untuk memperkuat kerja sama, saling mengenal potensi daerah, serta berbagi pengalaman dalam pembangunan.

Ia menilai Forum Bisnis Daerah menjadi salah satu agenda yang paling bermanfaat karena membuka peluang kolaborasi antardaerah.

"Forum Bisnis Daerah sangat baik jika lebih sering dilaksanakan. Daerah bisa saling mengenal potensi, membangun kerja sama, dan saling belajar untuk kemajuan bersama. Ini sejalan dengan tema APKASI, Satu Misi, Satu Aksi Membangun Negeri," ujarnya.

Selain memperkuat sinergi antarkabupaten, penyelenggaraan HUT ke-26 APKASI juga memberikan dampak positif terhadap perekonomian Deli Serdang.

Kehadiran ratusan peserta dari berbagai daerah, mulai dari kepala daerah, jajaran pemerintah, pelaku usaha, hingga tamu undangan, turut meningkatkan okupansi hotel, aktivitas UMKM, sektor kuliner, transportasi, hingga ekonomi kreatif.

Asri juga menyatakan kesiapan Pemerintah Kabupaten Deli Serdang untuk berbagi pengalaman kepada Kabupaten Belitung sebagai tuan rumah HUT APKASI berikutnya agar pelaksanaan kegiatan semakin baik.

Bupati yang akrab disapa Aci itu berharap APKASI terus berkembang sebagai organisasi yang mampu memperkuat kapasitas pemerintah kabupaten di seluruh Indonesia sekaligus menjadi wadah kolaborasi untuk mendorong pembangunan daerah yang lebih maju dan berdaya saing. (Ramdani)

Dinas Perkim Mukomuko Usulkan Tambahan 600 Unit Program Bedah RTLH Tahun 2026

Mukomuko, Jaya Pos

Pemerintah Kabupaten Mukomuko melalui Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (Perkim) kembali mengusulkan tambahan 600 unit program rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) kepada pemerintah pusat pada tahun 2026. Usulan tersebut merupakan tahap kedua setelah sebelumnya Kabupaten Mukomuko memperoleh alokasi 200 unit bantuan RTLH yang saat ini masih dalam proses pelaksanaan.

Kepala Dinas Perkim Kabupaten Mukomuko, Suryanto, mengatakan, pengajuan tambahan kuota tersebut dilakukan karena masih banyak rumah warga berpenghasilan rendah yang membutuhkan perbaikan agar memenuhi standar hunian yang layak.

"Usulan program bedah Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) ini merupakan bentuk kepedulian pemerintah terhadap masyarakat yang masih membutuhkan rumah layak huni. Kami berharap semakin banyak warga yang dapat merasakan manfaat dari program ini," ujar Suryanto, Rabu (8/7/2026).

Menurutnya, jumlah usulan tahun ini sengaja ditingkatkan menjadi 600 unit, lebih besar dibanding alokasi sebelumnya sebanyak 200 unit. Langkah tersebut dilakukan sebagai bentuk upaya maksimal pemerintah daerah dalam memperjuangkan kebutuhan masyarakat di bidang perumahan.

"Kami mengusulkan 600 unit karena kebutuhan di lapangan masih cukup besar. Harapan kami seluruh usulan dapat diakomodasi oleh pemerintah pusat. Namun apabila belum dapat dipenuhi seluruhnya, kami berharap setidaknya sebagian besar usulan



Suryanto, Kadis Perkim Mukomuko. (Foto/Japri)

tersebut bisa direalisasikan," katanya.

Suryanto menjelaskan, hingga saat ini usulan tambahan tersebut masih berada pada tahap pengajuan dan menunggu keputusan dari pemerintah pusat. Karena itu, besaran kuota yang akan diterima Kabupaten Mukomuko masih menunggu hasil evaluasi dan penetapan dari kementerian terkait.

Apabila usulan tersebut disetujui, maka total bantuan program rehabilitasi RTLH yang diterima Kabupaten Mukomuko akan mencapai 800 unit, terdiri atas 200 unit yang saat ini sedang berjalan dan tambahan 600 unit

yang diusulkan.

Dinas Perkim Mukomuko juga terus melakukan koordinasi dengan pemerintah pusat guna memperjuangkan tambahan kuota tersebut. Program rehabilitasi RTLH dinilai menjadi salah satu upaya pemerintah dalam meningkatkan kualitas tempat tinggal masyarakat sekaligus mendukung pengentasan kemiskinan melalui penyediaan hunian yang layak.

Bantuan rehabilitasi RTLH dipertukarkan bagi masyarakat berpenghasilan rendah yang memenuhi persyaratan sebagai Keluarga Penerima

Manfaat (KPM). Pelaksanaan program dilakukan melalui mekanisme pendataan dan verifikasi calon penerima serta pendampingan oleh kelompok penerima agar proses pelaksanaan berjalan tepat sasaran, transparan, dan sesuai ketentuan yang berlaku.

Pemerintah Kabupaten Mukomuko berharap usulan tambahan kuota tersebut mendapat persetujuan dari pemerintah pusat sehingga semakin banyak masyarakat yang dapat menikmati rumah yang lebih aman, sehat, dan layak huni sebagai bagian dari peningkatan kesejahteraan masyarakat. (Japri)

Polsek Baradatu Salurkan Bantuan Sosial kepada Warga Kurang Mampu di Way Kanan

Way Kanan, Jaya Pos

Polsek Baradatu menyerahkan bantuan sosial (bansos) kepada warga kurang mampu di Kecamatan Baradatu, Kabupaten Way Kanan, Minggu (5/7/2026). Kegiatan ini merupakan bagian dari rangkaian peringatan Hari Bhayangkara ke-80.

Bakti sosial dipimpin PS Kapolsek Baradatu AKP Sunaryo SE bersama personel dan ASN Polsek Baradatu. Bantuan disalurkan kepada warga yang membutuhkan di sejumlah kelurahan di Keca-



Pembagian Bansos Polsek Baradatu kepada masyarakat yang membutuhkan. (Dok hms)

matan Baradatu.

AKP Sunaryo mengatakan kegiatan tersebut menjadi wujud kepedulian Polri kepada masyarakat, sekaligus memperkuat hubungan antara kepolisian dan warga.

"Kegiatan ini merupakan bentuk empati dan kehadiran Polri bagi masyarakat yang memiliki keterbatasan ekonomi. Semoga bantuan yang diberikan dapat membantu memenuhi kebutuhan sehari-hari," ujar Sunaryo.

Ia berharap kegiatan sosial seperti ini dapat memberikan

manfaat bagi masyarakat sekaligus memperkuat kepercayaan publik terhadap Polri.

Warga penerima bantuan menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada jajaran Polsek Baradatu atas kepedulian yang diberikan.

Melalui kegiatan ini, Polsek Baradatu berharap Polri semakin dekat dengan masyarakat serta terus menjalankan peran sebagai pelindung, pengayom, dan pelayan masyarakat yang humanis, sejalan dengan semangat Hari Bhayangkara ke-80. (Suhaili)

Deli Serdang Tampilkan Potensi Daerah dan Mini Mall Pelayanan Publik di PRSU ke-50

Medan, Jaya Pos

Pemerintah Kabupaten Deli Serdang ikut berpartisipasi dalam Pekan Raya Sumatera Utara (PRSU) ke-50 yang resmi dibuka Wakil Gubernur Sumatera Utara, H. Surya BSc, di Jalan Gatot Subroto, Medan, Jumat (3/7/2026) malam.

Pada pembukaan tersebut, Pemerintah Kabupaten Deli Serdang diwakili Wakil Bupati Lom Lom Suwondo SS bersama Staf Ahli I TP PKK Deli Serdang, Ny Asniar Lom Lom Suwondo.

Dalam sambutannya, Wakil Gubernur Sumatera Utara Surya mengatakan PRSU tidak hanya menjadi ajang hiburan masyarakat, tetapi juga berfungsi sebagai wadah promosi pembangunan daerah, pengenalan potensi unggulan,

menarik investasi, sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi Sumatera Utara.

Mengusung tema "Harmoni Emas", PRSU ke-50 berlangsung pada 3 Juli hingga 2 Agustus 2026. Kegiatan ini menjadi ajang bagi seluruh kabupaten dan kota di Sumatera Utara untuk menampilkan potensi unggulan masing-masing.

Pada kesempatan itu, Paviliun Deli Serdang menghadirkan berbagai potensi daerah, inovasi pelayanan publik, serta produk unggulan hasil karya masyarakat.

Di lantai pertama, pengunjung dapat melihat produk UMKM, hasil pertanian, perikanan, kerajinan tangan, hingga produk unggulan Dekranasda Deli Serdang. Area luar paviliun juga menampilkan



Wakil Bupati Deli Serdang, Lom Lom Suwondo SS bersama Staf Ahli I TP PKK Deli Serdang, Ny Asniar Lom Lom Suwondo hadir dalam pembukaan Pekan Raya Sumatera Utara. (Dok Hms)

tanaman hortikultura, alat dan mesin pertanian berupa hand traktor, inovasi budidaya ikan di lahan sempit dari Dinas Perikanan, serta produk pertanian berbasis hidroponik.

Sementara di lantai dua, Pemerintah Kabupaten Deli Serdang menghadirkan Mini

Mall Pelayanan Publik. Fasilitas ini menampilkan berbagai layanan seperti administrasi kependudukan dan pencatatan sipil, perizinan terpadu, layanan kesehatan, pelayanan pajak daerah, pendampingan legalitas koperasi dan UMKM, pojok baca, hingga

media pembelajaran PAUD.

Mini Mall Pelayanan Publik menjadi salah satu daya tarik Paviliun Deli Serdang karena memberikan gambaran langsung mengenai transformasi pelayanan publik yang cepat, mudah, dan terintegrasi.

Keikutsertaan Deli Serdang dalam PRSU ke-50 juga dimanfaatkan untuk memperluas pemasaran produk lokal, serta mempromosikan sektor pertanian, perikanan, UMKM, dan ekonomi kreatif kepada masyarakat maupun calon investor.

Melalui ajang ini, Pemerintah Kabupaten Deli Serdang berharap potensi unggulan daerah semakin dikenal luas, membuka peluang kerja sama dan investasi. (Ramdani)

Wakil Bupati Deli Serdang Terima Kunjungan DPRD Sumut, Bahas UHC hingga Revisi RTRW

Lubuk Pakam, Jaya Pos

Wakil Bupati Deli Serdang, Lom Lom Suwondo, menerima kunjungan kerja pimpinan dan anggota DPRD Provinsi Sumatera Utara Daerah Pemilihan (Dapil) III Kabupaten Deli Serdang di Aula Cendana, Kantor Bupati Deli Serdang, Selasa (7/7/2026).

Kunjungan tersebut merupakan bagian dari fungsi pengawasan DPRD Sumut terhadap realisasi program dan kegiatan yang bersumber dari APBD Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2025 di Kabupaten Deli Serdang.

Dalam sambutannya, Lom Lom menyampaikan apresiasi atas kunjungan tersebut. Menurutnya, pengawasan DPRD penting untuk memastikan setiap program pembangunan berjalan efektif, tepat sasaran, tepat waktu, dan memberikan manfaat bagi masyarakat.

"Atas nama Pemerintah Kabupaten Deli Serdang, kami mengucapkan selamat datang dan terima kasih kepada pimpinan beserta anggota DPRD Provinsi Sumatera Utara. Kehadiran Bapak dan Ibu menjadi momentum untuk memperkuat sinergi antara pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten," ujar Lom Lom.

Ia menegaskan Pemkab Deli Serdang siap mendukung



Wakil Bupati Deli Serdang, Lom Lom Suwondo, menerima kunjungan kerja pimpinan dan anggota DPRD Provinsi Sumatera Utara Daerah Pemilihan (Dapil) III Kabupaten Deli Serdang di Aula Cendana, Kantor Bupati Deli Serdang, Selasa (7/7/2026). (Dok hms)

seluruh program pembangunan yang dibiayai APBD kabupaten maupun APBD provinsi melalui koordinasi dan kolaborasi dengan seluruh pemangku kepentingan. Pemerintah daerah juga terbuka terhadap masukan sebagai bahan evaluasi untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik dan pembangunan.

Ketua Tim Kunjungan Kerja, Subandi, mengatakan kegiatan tersebut bertujuan memastikan anggaran yang telah dialokasikan melalui APBD Sumut direalisasikan sesuai ketentuan dan memberikan manfaat bagi masyarakat.

Dalam pertemuan itu, sejumlah isu strategis turut dibahas, di antaranya usulan pembangunan daerah, revisi Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Deli Serdang Tahun 2026, optimalisasi

layanan kesehatan melalui Universal Health Coverage (UHC), penataan kawasan Stadion Utama Sumatera Utara beserta pengembangan UMKM, penanganan abrasi sungai di Kecamatan Tanjung Morawa, hingga realisasi dana bagi hasil pajak dari Pemerintah Provinsi Sumatera Utara.

Menanggapi berbagai masukan tersebut, Lom Lom memastikan seluruhnya akan ditindaklanjuti. Untuk penataan kawasan Stadion Utama Sumatera Utara, Pemkab Deli Serdang tengah menyiapkan langkah strategis agar kawasan tersebut lebih tertata, termasuk menyediakan ruang yang lebih representatif bagi pelaku UMKM dan meningkatkan fasilitas pendukung. Di sektor kesehatan, cakupan kepesertaan Universal Health Coverage (UHC) di

Kabupaten Deli Serdang telah mencapai sekitar 98,70 persen. Pemerintah daerah terus melakukan pemutakhiran data peserta BPJS Kesehatan agar bantuan layanan kesehatan semakin tepat sasaran.

Sementara itu, terkait abrasi sungai di Kecamatan Tanjung Morawa, Pemkab Deli Serdang telah melakukan pemetaan titik-titik rawan abrasi, longsor, dan kerusakan lingkungan. Penanganannya juga akan melibatkan perusahaan yang berada di sepanjang aliran sungai.

Terkait proses pengadaan jasa konsultansi revisi RTRW Kabupaten Deli Serdang Tahun 2026, Lom Lom menegaskan pemerintah daerah berkomitmen menjalankan prinsip transparansi dan akuntabilitas. Jika diperlukan, Inspektorat Kabupaten Deli Serdang akan melakukan pemeriksaan sesuai mekanisme yang berlaku dan hasilnya disampaikan kepada DPRD Sumut sebagai bentuk pertanggungjawaban.

Pertemuan berlangsung dalam suasana dialog yang konstruktif. Melalui kunjungan kerja ini, sinergi antara Pemerintah Provinsi Sumatera Utara, DPRD Sumut, dan Pemerintah Kabupaten Deli Serdang diharapkan semakin kuat untuk mendukung pembangunan yang berdampak langsung pada kesejahteraan masyarakat. (Ramdani)

Dana LPJU Ketapang Rp 95 Juta Halaman 1

diri korban berinisial R, sakti, Dedi Mofriadi, serta Ketua DPD Ikatan Wartawan Online Indonesia (IWOI) Kabupaten Ketapang, Mustakim.

Dalam keterangannya, Mulyono mengakui menerima uang Rp30 juta dari Dedi. Namun, ia membantah uang tersebut berkaitan dengan upaya memengaruhi proses hukum atau diberikan kepada oknum di Kejaksaan Negeri Ketapang.

"Benar saya menerima uang Rp30 juta dari Dedi, tetapi sifatnya pinjaman. Saya membantah uang tersebut digunakan untuk diberikan kepada oknum Kejaksaan," ujar Mulyono di Polres Ketapang.

Menanggapi perkembangan perkara tersebut, Ketua DPD IWOI Kabupaten Ketapang, Mustakim, menilai

penyidik perlu mendalami peran seluruh pihak yang diduga terlibat, termasuk penerima aliran dana.

Menurutnya, pihak IWOI mengikuti langsung jalannya mediasi dan mendengar keterangan dari para pihak terkait aliran dana Rp95 juta milik korban yang diduga menjadi bagian dari kasus penipuan dan penggelapan.

Mustakim juga menilai tidak menutup kemungkinan perkara dugaan penipuan tersebut memiliki keterkaitan dengan dugaan proyek LPJU fiktif Tahun Anggaran 2024 senilai Rp1,75 miliar yang saat ini sedang ditangani Kejaksaan Negeri Ketapang.

"Kami dari DPD IWOI Ketapang sedang mengumpulkan data terkait dugaan penipuan Rp95 juta ini untuk

melihat kemungkinan keterkaitannya dengan kasus LPJU fiktif yang sedang diproses," kata Mustakim.

Untuk menjaga prinsip keberimbangan, Japos.co telah beberapa kali mendatangi Kantor Kejaksaan Negeri Ketapang guna meminta konfirmasi terkait dugaan yang muncul dalam perkara tersebut. Namun, berdasarkan keterangan petugas, permohonan wawancara harus diajukan melalui mekanisme penjadwalan terlebih dahulu.

Hingga berita ini diterbitkan, Japos.co masih terus berupaya memperoleh konfirmasi resmi dari Kejaksaan Negeri Ketapang terkait dugaan aliran dana yang disebutkan dalam proses mediasi tersebut.

(Hardi)

Pilkades Serentak di Mukomuko Halaman 1

Pilkades.

Pelaksanaan Pilkades serentak tersebut dilakukan menyusul berakhirnya masa jabatan 37 kepala desa di 37 desa yang tersebar pada 13 kecamatan di Kabupaten Mukomuko pada November 2026.

Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Mukomuko, Juaidi, melalui Kepala Bidang Pemerintahan Desa, Darsono, Kamis (9/7/2026), menjelaskan bahwa penyelenggaraan Pilkades akan mengacu pada Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 16 Tahun 2026 yang mengatur masa jabatan dan tata kelola pemilihan kepala desa.

Menurut Darsono, kebijakan tersebut diambil berdasarkan hasil konsultasi DPMD dengan Kementerian Dalam Negeri.

"Regulasi yang menjadi acuan saat ini adalah PP Nomor 16 Tahun 2026. Mengingat Peraturan Menteri Dalam Negeri sebagai aturan pelaksanaan belum diterbitkan, namun berdasarkan hasil kon-

sultasi dengan Kemendagri, pemerintah daerah dapat menggunakan PP tersebut sebagai dasar pelaksanaan tanpa harus menunggu terbitnya Permendagri," ujar Darsono.

Ia menjelaskan, dalam PP Nomor 16 Tahun 2026 masih terdapat sejumlah ketentuan teknis yang belum diatur secara rinci. Oleh karena itu, pemerintah daerah masih dapat menggunakan Peraturan Daerah (Perda) maupun Peraturan Bupati (Perbup) yang telah ada, sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam PP tersebut.

"Saat ini revisi Perda sudah memasuki tahap harmonisasi di Kementerian Hukum. Revisi ini dilakukan untuk menyesuaikan aturan daerah dengan PP Nomor 16 Tahun 2026 sehingga memiliki kepastian hukum dalam pelaksanaan Pilkades," katanya.

Darsono menambahkan, karena masa jabatan 37 kepala desa berakhir pada November 2026, Pemerintah Kabupaten Mukomuko menargetkan Pilkades dapat dilaksanakan pada Oktober 2026. Dengan

jadwal tersebut, pemerintah berharap tidak terjadi kekosongan jabatan kepala desa yang harus diisi oleh pejabat sementara.

"Kami berupaya agar seluruh tahapan dapat selesai tepat waktu sehingga Pilkades dapat dilaksanakan pada Oktober dan tidak perlu ada pengisian kekosongan jabatan kepala desa," ujarnya.

Ia juga mengajak seluruh elemen masyarakat, pemerintah desa, penyelenggara, serta para pemangku kepentingan untuk mendukung seluruh tahapan Pilkades agar berlangsung aman, tertib, demokratis, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

"Kami berharap seluruh pihak dapat bersama-sama menyukseskan Pilkades Serentak 2026 sehingga proses demokrasi di tingkat desa dapat berjalan lancar, kondusif, dan menghasilkan kepala desa yang mampu membawa kemajuan bagi masyarakat," pungkas Darsono.

(Japri)

Sat Lantas Polres Way Kanan Gelar Halaman 1

Kampung Negeri Baru, Kecamatan Umpu Semenguk, Kabupaten Way Kanan.

Kegiatan tersebut dipimpin tiga personel Sat Lantas Polres Way Kanan, yakni Bripta Dimas Arya, Briptu Putu Eka, dan Briptu Trias Nata.

Kasat Lantas Polres Way Kanan, AKP Sulkhan SH MH, mengatakan patroli malam dilakukan untuk meng-

antisipasi gangguan lalu lintas sekaligus menekan angka kecelakaan di wilayah hukum Polres Way Kanan.

"Personel menyisir jalur yang menjadi titik rawan kecelakaan atau 'troubleshoot' serta kawasan padat kendaraan di sepanjang Jalan Lintas Tengah (Jalinteng) Sumatera. Patroli juga dilakukan di objek vital, rest area, dan pusat keramaian masyarakat," ujar Sulkhan.

Selain memantau kondisi arus lalu lintas, petugas juga memberikan edukasi kepada para pengguna jalan mengenai pentingnya tertib berlalu lintas serta mematuhi Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

"Kami mengimbau masyarakat agar selalu mengutamakan keselamatan dan mematuhi peraturan lalu lin-

tas demi keamanan dan kenyamanan bersama," katanya.

Berdasarkan hasil patroli, arus lalu lintas di wilayah tersebut terpantau lancar dengan kondisi cuaca cerah. Hingga kegiatan berakhir, situasi di wilayah hukum Polres Way Kanan berlangsung aman dan kondusif, tanpa adanya kecelakaan lalu lintas maupun tindak kriminal yang menonjol. (Suhaili)

Jejak Korupsi Batu Bara Halaman 1

dana serta mengumpulkan alat bukti dalam perkara yang tengah ditangani. Sejumlah lokasi yang diduga memiliki keterkaitan dengan perkara tersebut menjadi sasaran penyidik, mulai dari restoran, kantor penulisan, hingga sebuah rumah mewah yang menyimpan aset bernilai fantastis.

Salah satu lokasi yang digeledah ialah restoran Prancis de'Clan Signature di kawasan Cipete, Jakarta Selatan, pada Rabu (8/7/2026). Hampir bersamaan, penyidik juga melakukan pengeledahan di kantor Koin Money Changer yang diduga berkaitan dengan dugaan tindak pidana pencucian uang dalam rangkaian perkara korupsi tersebut.

Pengeledahan kemudian berlanjut ke sebuah rumah mewah di kawasan Sentul, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, pada Kamis (9/7/2026) dini hari. Rumah tersebut menjadi perhatian karena penyidik menemukan brankas yang berisi uang tunai dan emas batangan dalam jumlah sangat besar.

Kepala Kortas Tipidkor Polri Brigjen Totok Suharyanto mengatakan penyidik menemukan brankas yang disembunyikan di balik dinding restoran de'Clan Signature. Di dalamnya tersimpan uang tunai dalam mata uang asing dan rupiah.

Barang bukti yang disita terdiri atas 3.130.000 dolar Singapura, 889.965 dolar Amerika Serikat, serta uang tunai sebesar Rp259.159.000. Jika dikonversi ke mata uang rupiah, nilainya diperkirakan mencapai hampir Rp60 miliar.

Selain uang tunai, penyidik juga mengamankan sejumlah dokumen penting yang diduga berkaitan dengan perkara, serta perangkat elektronik berupa telepon seluler yang akan didalami melalui proses penyidikan.

Pada hari yang sama, penyidik turut menggeledah Koin Money Changer. Dari lokasi tersebut, Kortas Tipidkor Polri menyita 71 barang bukti beserta 16 jenis valu-

geledahan di rumah pribadi Febrie Adriansyah di Jalan Radio I, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan.

Anang menegaskan pihaknya tidak menerima informasi mengenai pengeledahan tersebut dan meminta masyarakat tidak mempercayai informasi yang belum memiliki sumber yang jelas.

TNI Tegakan Pengamanan Rumah Febrie Tidak Berkaitan

Rumah pribadi Febrie Adriansyah sempat menjadi perhatian publik setelah terlihat dijaga sejumlah personel TNI sejak Rabu malam. Situasi tersebut memicu spekulasi karena berlangsung bersamaan dengan rangkaian pengeledahan yang dilakukan Kortas Tipidkor Polri.

Namun Kepala Pusat Penerangan TNI Brigjen TNI Muhammad Nas memastikan pengamanan tersebut tidak berkaitan dengan proses penyidikan yang sedang berlangsung.

Menurutnya, pengamanan dilakukan atas permintaan Kejaksaan Agung sebagai bentuk perlindungan terhadap jaksa yang menangani perkara sesuai ketentuan dalam Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2025.

Penjelasan serupa juga disampaikan Kapuspenkum Kejaksaan Agung Anang Supriatna. Ia mengatakan pengamanan di kediaman Jampidus telah berlangsung cukup lama sebagai bagian dari kerja sama antara Kejaksaan Agung dan TNI. Pengamanan tersebut dilakukan karena tingginya risiko keamanan dalam penanganan sejumlah perkara korupsi besar.

Anang juga memastikan Febrie Adriansyah tetap menjalankan aktivitas kedinasan seperti biasa.

Dugaan Korupsi Batu Bara Disorot

Selain menelusuri dugaan TPPU, Kortas Tipidkor Polri juga memfokuskan penyidi-

geledahan di rumah pribadi Febrie Adriansyah di Jalan Radio I, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan.

Anang menegaskan pihaknya tidak menerima informasi mengenai pengeledahan tersebut dan meminta masyarakat tidak mempercayai informasi yang belum memiliki sumber yang jelas.

TNI Tegakan Pengamanan Rumah Febrie Tidak Berkaitan

Rumah pribadi Febrie Adriansyah sempat menjadi perhatian publik setelah terlihat dijaga sejumlah personel TNI sejak Rabu malam. Situasi tersebut memicu spekulasi karena berlangsung bersamaan dengan rangkaian pengeledahan yang dilakukan Kortas Tipidkor Polri.

Namun Kepala Pusat Penerangan TNI Brigjen TNI Muhammad Nas memastikan pengamanan tersebut tidak berkaitan dengan proses penyidikan yang sedang berlangsung.

Menurutnya, pengamanan dilakukan atas permintaan Kejaksaan Agung sebagai bentuk perlindungan terhadap jaksa yang menangani perkara sesuai ketentuan dalam Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2025.

Penjelasan serupa juga disampaikan Kapuspenkum Kejaksaan Agung Anang Supriatna. Ia mengatakan pengamanan di kediaman Jampidus telah berlangsung cukup lama sebagai bagian dari kerja sama antara Kejaksaan Agung dan TNI. Pengamanan tersebut dilakukan karena tingginya risiko keamanan dalam penanganan sejumlah perkara korupsi besar.

Anang juga memastikan Febrie Adriansyah tetap menjalankan aktivitas kedinasan seperti biasa.

Dugaan Korupsi Batu Bara Disorot

Selain menelusuri dugaan TPPU, Kortas Tipidkor Polri juga memfokuskan penyidi-

kan pada dugaan penyimpanan dalam penyaluran batu bara untuk PLTU.

Kabag Ops Kortas Tipidkor Polri Kombes Ahmad Yusuf Afandi mengungkapkan dugaan manipulasi terhadap kualitas maupun kuantitas batu bara yang dikirim ke pembangkit listrik.

Menurutnya, batu bara yang diterima diduga tidak sesuai dengan spesifikasi yang telah dibayarkan. Dugaan penyimpanan tersebut dinilai berdampak pada terganggunya operasional pembangkit hingga memicu pemadaman listrik di sejumlah wilayah.

Ketua Komisi III DPR RI Habiburrahman mendukung langkah Kortas Tipidkor Polri mengusut dugaan korupsi batu bara hingga tuntas.

Ia menilai perkara tersebut bukan hanya menyebabkan kerugian negara dalam jumlah besar, tetapi juga berdampak langsung kepada masyarakat akibat terjadinya pemadaman listrik di berbagai daerah. Karena itu, siapa pun yang terbukti terlibat harus diproses sesuai hukum yang berlaku.

Sementara itu, Indonesia Police Watch (IPW) menilai rangkaian pengeledahan yang dilakukan bersama Polda Metro Jaya menjadi langkah penting untuk mengungkap dugaan korupsi, tindak pidana pencucian uang, hingga praktik mafia perkara yang diduga saling berkaitan.

Ketua IPW Sugeng Teguh Santoso menyebut operasi tersebut berpotensi membuka keterlibatan berbagai pihak, baik dari kalangan swasta maupun penyelenggara negara, yang diduga menerima suap atau menikmati hasil tindak pidana korupsi.

Menurutnya, pengeledahan yang dilakukan Kortas Tipidkor Polri merupakan salah satu operasi penegakan hukum terbesar dalam beberapa waktu terakhir dan dapat menjadi pintu masuk untuk mengungkap jaringan korupsi yang lebih luas. (Red)

AHY Buka Sinode Besar GPI 2026 Halaman 1

Ia juga mengapresiasi peran Gereja Pentakosta Indonesia (GPI) yang telah hadir sejak 1936. Menurutnya, GPI tidak hanya menjalankan pelayanan keagamaan, tetapi juga berkontribusi dalam pembentukan karakter bangsa dan memperkuat semangat kebangsaan.

"Tidak perlu mempertentangkan agama dan nasionalisme. Pancasila dan seluruh agama di Indonesia memiliki tujuan yang sama, yakni menciptakan perdamaian, persatuan, dan kesejahteraan. Perbedaan adalah kekayaan yang harus dijaga bersama," katanya.

AHY menilai tema Sinode Besar GPI 2026 relevan dengan tantangan global saat ini, mulai dari konflik internasional, krisis iklim, hingga perkembangan teknologi kecerdasan buatan (AI).

"Di tengah perubahan

yang begitu cepat, gereja menjadi kompas moral. Kita membutuhkan integritas, karakter yang kuat, dan kemampuan memanfaatkan teknologi sebagai sarana pembangunan," ujarnya.

Sementara itu, Bupati Simalungun Anton Achmad Saragih menyambut baik pelaksanaan Sinode Besar GPI sebagai momentum memperkuat keimanan sekaligus meningkatkan sinergi antara pemerintah dan gereja.

Menurutnya, penguasaan diri menjadi salah satu kunci menjaga persatuan di tengah berbagai tantangan sosial.

"Penguasaan diri merupakan benteng melawan radikalisme, perpecahan, hoaks, dan berbagai penyakit sosial. Jika itu terjaga, maka kedamaian dan kerukunan di daerah kita akan tetap kuat," ujar Anton.

(Rd)

KDM Turun Tangan Akhiri Polemik Halaman 1

akan dimediasi oleh Pak Dedi antara pihak Tasikmalaya dan pihak Wanasisgra," ujar Yudi.

Untuk sementara, kata Yudi, kami menunggu hasil mediasi nanti seperti apa. Kami menunggu arahan dari Pak Dedi Mulyadi untuk mempertemukan pihak-pihak yang berkaitan dengan persoalan ini. "Harapan kami tentu semuanya bisa baik-baik saja. Mudah-mudahan ada solusi terbaik setelah dimediasi nanti," katanya.

Dalam kunjungannya yang diunggah di media sosial, Gubernur Jabar, KDM sempat bertemu warga penghibah menjadi pintu masuk untuk mengungkap jaringan korupsi yang lebih luas. (Red)

ketidaksepahaman karena warga Ciamis menghimbau tanahnya secara gratis, sementara di wilayah Pemkot Tasikmalaya akses jalannya justru dibebaskan dan dibayar. "Ya ini kita di Jembatan Gantung Wanasisgra yang kemarin ditutup karena ada ketidaksepahaman. Kalau Kuwu Wanasisgra dulu tanpa pembebasan. Artinya rakyat ikhlas menghimbau tanah untuk jembatan. Termasuk aki. Nah ternyata di Pemkot Tasik dibebaskan. Dibiayai oleh Pemkot Tasikmalaya. Akhirnya merasa dulu katanya mau ikhlas, sekarang dibebaskan, dibiayai, dibayar," jelas KDM dalam

videonya.

Guna menyelesaikan polemik, KDM berjanji akan memediasi seluruh pihak terkait dan menggelontorkan anggaran sekitar Rp 1,5 miliar untuk membangun jalan cor menuju Sukamenak sepanjang 400 meter. "Sudah, nanti akan kita undang Pemkot Tasik, kita undang Kepala Desa Sukamenak, kita undang bareng dengan Kuwu Wanasisgra. Nanti sebentar lagi juga akan saya bangun, jalan yang menuju Sukamenak. Panjangnya kurang lebih 400 meter. Nilainya murah lebih Rp 1,5 miliar, dicor," pungkasnya.

(Mamay)

Bupati Simalungun Pastikan Penanganan Longsor di Nagori Marubun Lokkung Tuntas Hingga Rampung

Simalungun, Jaya Pos

Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Simalungun menegaskan komitmennya untuk menuntaskan penanganan bencana longsor yang memutus akses jalan di Nagori Marubun Lokkung, Kecamatan Dolok Silou, Sumatra Utara.

Komitmen tersebut disampaikan Bupati Simalungun, Dr. H. Anton Achmad Saragih, melalui Sekretaris Daerah (Sekda) Mixnon Andreas Simamora di Pematang Raya, Kamis (9/7/2026).

"Pemkab Simalungun terus melakukan penanganan di lokasi meski proses pekerjaan masih terkendala cuaca," ujar Mixnon.

Longsor yang terjadi menga-

kibatkan akses jalan penghubung Nagori Marubun Lokkung dengan Nagori Tinggi Raja, Kecamatan Silou Kahean, terputus. Kondisi itu berdampak pada mobilitas warga serta distribusi hasil pertanian dan perkebunan.

Menurut Sekda, jalan tersebut merupakan jalur vital bagi masyarakat sehingga pemerintah akan menyelesaikan proses perbaikan hingga tuntas dan aman digunakan kembali.

Sementara itu, perwakilan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Simalungun, Oliver Silalahi, menjelaskan pekerjaan di lapangan tetap berlangsung meski mengha-



Bupati Simalungun turun langsung, tuntaskan Pembangunan, Perbaikan bencana longsor melanda Nagori Marubun Lokkung Kecamatan Dolok Silau. (dok)

pekerjaan harus ditambah. Pembangunan Tembok Penahan Tanah (TPT) yang semula direncanakan sepanjang 30 meter diperpanjang menjadi 39 meter. Begitu pula pekerjaan box culvert yang bertambah dari 9 meter menjadi 21 meter.

Selain faktor cuaca, akses menuju lokasi yang terbatas juga menghambat pengiriman material di sekitar lokasi pun sangat minim sehingga pasokan sering mengalami keterlambatan.

Kondisi area pekerjaan yang sempit dan tidak adanya jalur alternatif juga menjadi tantangan tersendiri karena aktivitas warga

yang mengangkut hasil pertanian harus tetap berjalan bersamaan dengan proses perbaikan.

"Akibat longsor susulan terjadi penambahan volume pekerjaan. Karena itu, waktu pelaksanaan diperpanjang dan ditargetkan selesai pada Agustus 2026," kata Oliver.

Pemkab Simalungun memastikan akan terus memantau perkembangan di lapangan serta menggerakkan seluruh sumber daya yang diperlukan agar penanganan longsor dapat diselesaikan secepatnya sehingga akses masyarakat kembali normal dan aktivitas ekonomi warga dapat pulih.

(Rd)

Tegaskan Komitmen Dukungan Pembangunan Daerah Kapolres Maros Ucapkan Selamat Hari Jadi ke-67 Kabupaten Maros

Maros, Jaya Pos

Kapolres Maros AKBP Douglas Mahendrajaya bersama jajaran Polres Maros dan Bhayangkari Cabang Maros menyampaikan ucapan selamat Hari Jadi ke-67 Kabupaten Maros kepada seluruh masyarakat. Momentu peringatan hari jadi ini diharapkan menjadi penguat sinergi seluruh elemen dalam menjaga tradisi sekaligus mendorong kemajuan daerah.

Ucapan tersebut disampaikan sebagai bentuk dukungan Polres Maros terhadap peringatan Hari Jadi ke-67 Kabupaten Maros yang mengusung tema "Merawat Tradisi, Menjemput Kemajuan."

Kapolres Maros AKBP Douglas Mahendrajaya mengatakan, peringatan hari jadi tidak hanya menjadi agenda seremonial tahunan, tetapi juga momentum untuk memperkuat kebersamaan antara pemerintah, aparat keamanan, dan masyarakat dalam membangun Kabupaten Maros.

"Selamat Hari Jadi ke-67 Kabupaten Maros. Semoga semangat "Merawat Tradisi, Menjemput Kemajuan" menjadi inspirasi bagi seluruh elemen masyarakat untuk terus bersinergi membangun Maros yang lebih maju, berdaya saing, serta tetap menjunjung

tinggi nilai-nilai budaya dan kebersamaan," ujar Douglas, Sabtu (4/7/2026).

Ia berharap Kabupaten Maros terus berkembang menjadi daerah yang maju, aman, dan sejahtera tanpa meninggalkan jati diri serta kearifan lokal yang selama ini menjadi identitas masyarakat.

Menurutnya, kolaborasi antara Pemerintah Kabupaten Maros, TNI, Polri, dan seluruh komponen masyarakat menjadi faktor penting dalam mendukung pembangunan yang berkelanjutan.

Douglas juga menegaskan komitmen Polres Maros untuk terus memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat melalui perlindungan, pengayoman, dan penegakan hukum yang profesional. Selain itu, pihaknya akan terus menjaga situasi keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas) agar seluruh program pembangunan daerah dapat berjalan dengan aman dan kondusif.

Ia berharap peringatan Hari Jadi ke-67 Kabupaten Maros dapat semakin mempererat persatuan dan kolaborasi seluruh elemen masyarakat dalam mewujudkan daerah yang maju, harmonis, dan tetap melestarikan tradisi sebagai bagian dari identitas Kabupaten Maros. (Hk)



Kapolres Maros. (ist)

Gelar Nobar Sepak Bola Dunia Korem 022/PT Pererat Kemanunggalan TNI dan Rakyat



Korem 022/PT, nobar pertandingan sepak Bola di Food Court, meriah di hadiri oleh prajurit, masyarakat serta warga binaan. (Foto/Rd)

Pematangsiantar, Jaya Pos

Korem 022/Pantai Timur (PT) menggelar kegiatan nonton bareng (nobar) pertandingan sepak bola dunia bersama masyarakat sebagai upaya mempererat silaturahmi sekaligus memperkuat kemanunggalan TNI dengan rakyat. Kegiatan yang berlangsung di Food Court Korem 022/PT, Jumat (10/7/2026) dini hari pukul 03.00 WIB itu diikuti prajurit TNI, warga binaan, dan masyarakat sekitar dalam suasana penuh keakraban.

Sejak sebelum pertandingan dimulai, ratusan peserta telah memadati lokasi. Mereka menyaksikan pertandingan secara bersama-sama dengan tertib dan penuh antusias. Sorak sorai, tepuk tangan, hingga yel-yel dukungan mewarnai jalannya laga, menciptakan suasana hangat yang mencerminkan kebersamaan antara prajurit TNI dan masyarakat.

Kegiatan nobar tersebut tidak hanya menjadi ajang hiburan, tetapi juga menjadi media komunikasi sosial yang dinilai efektif untuk mempererat hubungan emosional antara aparat TNI dan warga. Melalui momentum olahraga yang digemari berbagai kalangan, Korem 022/PT berharap dapat membangun semangat persatuan, memperkuat rasa kekeluargaan, serta meningkatkan kepedulian bersama dalam menjaga keamanan dan ketertiban wilayah.

Komandan Korem 022/Pantai Timur, Kolonel Inf. Sandi Kamidiyanto, S.I.P., M.I.P., mengatakan kegiatan nonton bareng merupakan salah satu bentuk pendekatan humanis yang dilakukan TNI kepada masyarakat.

"Melalui kegiatan sederhana seperti nonton bareng ini, kita dapat mempererat tali silaturahmi, memperkuat kebersamaan, serta membangun komunikasi yang harmonis antara prajurit dengan masyarakat. Kemanunggalan TNI dengan rakyat merupakan kekuatan utama dalam menjaga persatuan, keamanan, dan keutuhan bangsa. Kami berharap kebersamaan seperti ini terus terjalin dalam berbagai kesempatan," ujar Danrem.

Menurutnya, komunikasi yang baik antara TNI dan masyarakat menjadi modal penting dalam menciptakan situasi wilayah yang aman, kondusif, serta mendukung pembangunan daerah. Karena itu, Korem 022/PT akan terus menghadirkan berbagai kegiatan yang melibatkan masyarakat sebagai bagian dari pembinaan teritorial.

Selama pelaksanaan kegiatan, suasana berlangsung aman, tertib, dan penuh sportivitas. Seluruh peserta menikmati jalannya pertandingan dengan tetap menjaga ketertiban dan saling menghormati satu sama lain. Kebersamaan yang tercipta menunjukkan kuatnya hubungan emosional antara prajurit TNI dengan masyarakat di wilayah binaan.

Melalui kegiatan ini, Korem 022/Pantai Timur kembali menegaskan komitmennya untuk terus hadir di tengah masyarakat melalui berbagai kegiatan yang bersifat humanis, komunikatif, dan membangun. Selain memperkuat hubungan sosial, kegiatan tersebut juga menjadi sarana memperkokoh nilai-nilai persatuan, kebersamaan, serta semangat gotong royong sebagai fondasi dalam menjaga stabilitas wilayah. (Rd)

Tim Presisi Polres Langkat Sisir Jalur Protokol Hingga Perbatasan Cegah Begal Dan Tawuran

Langkat, Jaya Pos

Satuan Lalu Lintas (Satlant) Polres Langkat melaksanakan kegiatan pengaturan lalu lintas pada jam padat pagi sekaligus memberikan himbauan tertib berlalu lintas kepada masyarakat, Selasa (07/07/2026).

Kegiatan ini dimulai pukul 06.45 WIB hingga selesai dan berlangsung dalam kondisi cuaca cerah.

Kegiatan dipimpin langsung oleh Kasat Lantas Polres Langkat AKP Mhd. Tommy Franata, S.T.K., S.I.K., M.H., M.T., serta seluruh personel Satlant, Sebelum pelaksanaan di lapangan, seluruh personel terlebih dahulu mengikuti apel kesiapan yang sebagai bentuk



Polres Langkat melaksanakan kegiatan pengaturan lalu lintas pada jam padat pagi hari. (Foto/Humas)

pengecekan personel dan penyiapan arahan tugas.

Dalam pelaksanaannya, personel Satlant melakukan pengaturan arus lalu lintas di sejumlah titik rawan kemacetan dan persimpangan jalan

utama. Selain itu, petugas juga memberikan teguran simpatik kepada pengguna jalan yang melakukan pelanggaran lalu lintas kasat mata, dengan tujuan meningkatkan kesadaran masyarakat tanpa mengede-

pankan tindakan represif.

Satlant Polres Langkat juga melaksanakan patroli public address dengan menyampaikan himbauan kepada masyarakat agar selalu tertib dan mematuhi peraturan lalu lintas demi keselamatan bersama.

Melalui pengeras suara, petugas mengingatkan pentingnya penggunaan helm, sabuk pengaman, serta larangan melawan arus dan menggunakan ponsel saat berkendara.

Adapun lokasi sasaran kegiatan pengaturan seputaran Kota Stabat seperti di Sepanjang Jalan Proklamasi No. 53, Kelurahan Kwala Bingai, Kecamatan Stabat, Kabupaten Langkat.

Hasil dari kegiatan ini ter-

ciptanya situasi keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas (Kamseltibcarlantas) yang kondusif.

Selain itu, kegiatan ini diharapkan mampu menurunkan angka pelanggaran dan kecelakaan lalu lintas, serta mengurangi tingkat fatalitas korban kecelakaan di wilayah hukum Polres Langkat.

Kegiatan pengaturan lalu lintas pada pos padat pagi ini berjalan dengan aman, tertib, dan lancar, serta berakhir pada pukul 07.50 WIB. Satlant Polres Langkat berkomitmen untuk terus hadir di tengah masyarakat guna memberikan pelayanan terbaik demi terwujudnya keselamatan berlalu lintas. (Fatimah)

Desa Sukasari Gelar Musdes Sosialisasi Penerimaan Bantuan Keuangan Provinsi Banten Tahun Anggaran 2026

Tangerang, Jaya Pos

Pemerintah Desa Sukasari, Kecamatan Rajeg, Kabupaten Tangerang, menggelar Musyawarah Desa (Musdes) dalam rangka Sosialisasi Penerimaan Bantuan Keuangan (Banprov) Pemerintah Provinsi Banten Tahun Anggaran 2026 di Aula Kantor Desa Sukasari, Selasa (7/7/2026).

Kegiatan tersebut dihadiri Kepala Desa Sukasari Mukhlis, Ketua Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Drs. Ahmadin, perangkat desa, para Ketua RT dan RW, kader PKK, tokoh masyarakat, serta

sejumlah warga. Musdes ini menjadi forum untuk menyampaikan informasi mengenai mekanisme dan rencana pelaksanaan program Bantuan Keuangan Provinsi Banten Tahun Anggaran 2026 sekaligus memperkuat koordinasi antara pemerintah desa dengan seluruh unsur masyarakat.

Dalam sambutannya, Kepala Desa Sukasari Mukhlis menekankan pentingnya sinergi dan kekompatan seluruh perangkat kewilayahan, khususnya Ketua RT dan RW, dalam mendukung berbagai program pembangunan desa.



Mukhlis Kepala Desa Sukasari kecamatan Rajeg Tangerang Banten. (Foto/Abd)

Menurutnya, keberhasilan pembangunan tidak hanya bergantung pada pemerintah desa,

tetapi juga pada peran aktif seluruh elemen masyarakat. Ia juga meminta agar hasil

Musyawarah Desa disampaikan kepada RT dan RW yang berhalangan hadir, sehingga seluruh perangkat kewilayahan memperoleh informasi yang sama mengenai program Bantuan Keuangan Provinsi Banten dan dapat mendukung pelaksanaannya secara maksimal.

Menurut Mukhlis, keterbukaan informasi dan koordinasi yang baik merupakan bagian penting dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan desa yang transparan, akuntabel, dan partisipatif. Sementara itu, Ketua BPD

Desa Sukasari Drs. Ahmadin mengajak seluruh elemen masyarakat untuk terus menjaga kebersamaan dalam mengawal setiap program pembangunan desa. Ia berharap hubungan yang harmonis antara Pemerintah Desa, BPD, RT, RW, kader PKK, tokoh masyarakat, dan warga dapat terus dipertahankan demi kemajuan Desa Sukasari.

Selain penyampaian materi sosialisasi, Musdes juga diisi dengan sesi diskusi dan tanya jawab yang berlangsung interaktif. Sejumlah peserta menyampaikan masukan dan

pertanyaan terkait mekanisme pelaksanaan program bantuan, yang kemudian dijawab oleh pemerintah desa.

Seluruh rangkaian kegiatan berlangsung dalam suasana kondusif, tertib, dan lancar. Pemerintah Desa Sukasari menyampaikan apresiasi kepada seluruh peserta yang telah hadir dan berpartisipasi aktif dalam Musyawarah Desa sebagai bentuk komitmen bersama mendukung pembangunan desa yang lebih maju, transparan, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat. (Abd)

Sebut Pedagang Belum Tempati Kios

Camat Dolok Batu Nanggar Bantah Relokasi Pasar Serbelawan Ditelantarkan

Simalungun, Jaya Pos

Camat Dolok Batu Nanggar, Siti Aminah Siregar, membantah pemberitaan yang menyebut Bupati Simalungun dan Pemerintah Kecamatan Dolok Batu Nanggar menelantarkan bangunan relokasi Pasar Serbelawan.

Dalam keterangannya, Jumat (3/7/2026), Siti Aminah menegaskan informasi tersebut tidak sesuai dengan kondisi di lapangan. Menurutnya, sejak pembangunan hingga bangunan selesai, pemerintah terus berupaya agar para pedagang segera menempati kios relokasi yang telah disediakan.

"Setelah kebakaran Pasar Serbelawan, para pedagang meminta pemerintah membangun lokasi relokasi agar aktivitas perdagangan dapat kembali berjalan, terutama menjelang Hari Raya Idulfitri 1447 Hijriah. Permintaan itu langsung ditindaklanjuti dengan pembangunan tempat relokasi yang layak," ujar Siti Aminah.

Ia menjelaskan, bangunan relokasi yang dibangun Pemerintah Kabupaten Simalungun terdiri dari 131 unit kios. Seluruh kios telah dilengkapi fasilitas pendukung, seperti jaringan listrik, air bersih, sanitasi, serta lingkungan yang

dirancang bebas dari genangan dan banjir.

Menurut Siti Aminah, pemerintah kecamatan juga telah beberapa kali menggelar sosialisasi dan rapat koordinasi bersama para pedagang.

Pada 4 Februari 2026, pemerintah mengadakan pertemuan dengan pedagang, khususnya pedagang kain, untuk membahas mekanisme pembagian kios. Dua hari kemudian, 6 Februari 2026, dilakukan peninjauan lokasi sekaligus pembagian kios melalui sistem undian.

Saat itu, sebagian pedagang menyampaikan keberatan karena menginginkan posisi kios yang sama seperti sebelum pasar terbakar.

Menindaklanjuti aspirasi tersebut, Pemerintah Kecamatan Dolok Batu Nanggar kembali menggelar rapat koordinasi pada 13 Februari 2026 bersama para pedagang dan unsur Forum Koordinasi Pimpinan Kecamatan (Forkopimcam). Dalam pertemuan itu, para pedagang akhirnya menyepakati hasil pembagian kios.

"Setelah tercapai kesepakatan, kami berharap para pedagang segera menem-



Camat Dolok Batu Nanggar, Siti Aminah Siregar. (Dok ist)

▶▶Halaman 11

Wali Kota Banjar Kunjungi Rumah Duka Pekerja yang Meninggal Dunia Akibat Insiden Ambruknya Tower

Banjar, Jaya Pos

Suasana duka masih menyelimuti kediaman pasangan lansia Hanan (76) dan Emeh (70) di RT 03/RW 19 Lingkungan Panatasan Kelurahan Pataruman. Putra ketiga mereka dari 12 bersaudara, Endut Kuswara (46), meninggal dunia setelah mengalami kecelakaan kerja tragis, jatuh dari sebuah tower.

Pihak keluarga menyatakan telah ikhlas menerima kepergian almarhum dan memilih untuk menye-



Wali Kota Banjar, Sudarsono, menyambangi rumah duka pekerja yang meninggal dunia akibat insiden ambruknya tower setinggi 40 meter di Kompleks Perkantoran Purwaharja. (Foto:Mamay)

▶▶ Halaman 11

Kasus MBA di Pangandaran Terus Bergulir

Pangandaran, Jaya Pos

Penanganan kasus dugaan investasi bodong melalui aplikasi MBA, resmi dilimpahkan dari Polres Pangandaran ke Polda Jawa Barat (Jabar). Menyusul pelimpahan tersebut, sejumlah korban didampingi kuasa hukumnya mendatangi Mapolres Pangandaran untuk menjalani pemeriksaan, Rabu (2/7).

Kuasa hukum para korban, Wawan Suprawan, membenarkan bahwa agenda kedatangannya ke



Kapolres Pangandaran AKBP Ikrar Potawari menyampaikan bahwa pihak kepolisian saat ini masih terus melakukan pendataan terhadap para korban MBA. (Foto:Mamay)

▶▶ Halaman 11

Dorong Konsumsi Ikan dan Tekan Stunting Disnakan Ciamis Gelar Gerakan GEMARIKAN di Desa Jalatrang

Ciamis, Jaya Pos

Dinas Peternakan dan Perikanan (Disnakan) Kabupaten Ciamis terus berkomitmen untuk meningkatkan kualitas gizi masyarakat sekaligus menekan angka stunting. Salah satu langkah nyata adalah dengan menyelenggarakan kegiatan Gerakan Memasyarakatkan Makan Ikan (GEMARIKAN) bertempat di Desa Jalatrang, Kecamatan Cipaku, Selasa (7/7).

Kegiatan ini secara khusus menyoroti elemen masyarakat yang krusial dalam pencegahan stunting, di antaranya Orang tua balita stunting, keluarga berisiko stunting, Ibu hamil dan ibu menyusui, Kader Posyandu.

Hadir secara langsung mewakili Kepala Dinas (Kadis) Dr. Drs. Anton Wahyu Radityananto, M.Si., yaitu Kepala Bidang Kesehatan Hewan, Ikan, Kesmavet, Pengolahan, dan Pemasaran Hasil Peternakan dan Perikanan, drh. Asri Kurnia, MP.

Dalam sambutannya, drh.



Kabid Kesehatan Hewan, Ikan, Kesmavet, Pengolahan dan Pemasaran Hasil Peternakan dan Perikanan Kabupaten Ciamis, Asri Kurnia selepas menggelar kegiatan pemberian olahan ikan di Desa Jalatrang. (Foto:Mamay)

Asri menekankan pentingnya kandungan gizi ikan untuk tumbuh kembang anak dan pencegahan stunting sejak dini.

Acara ini juga mendapat dukungan penuh dari berbagai unsur kewilayahan. Tampak hadir dalam kegiatan tersebut: Sekmat Cipaku, Ketua forikan Kecamatan Cipaku, Kepala Desa Jalatrang, Ketua Forikan Desa Jalatrang, Bhabinkamtibas Desa Jalatrang, Babinsa Desa Jalatrang, Ketua BPD,

▶▶Halaman 11

Ketua MUI, Penyuluh Perikanan Kecamatan Cipaku, Kepala UPTD Peternakan & Perikanan Wilayah Kawali, Ketua Posyandu se Desa Jalatrang, Bidan Desa, KPM Desa Jalatrang dan perwakilan calon penerima manfaat.

Tidak hanya sekadar memberikan penyuluhan dan edukasi mengenai pentingnya gemar makan ikan bagi kecerdasan dan kesehatan anak,

Bupati Garut Ajak Masyarakat dan Pelaku Usaha Berikan Data Akurat dalam Sensus Ekonomi 2026

Garut, Jaya Pos

Bupati Garut, Abdusy Syukur Amin, mengajak seluruh masyarakat dan pelaku usaha di Kabupaten Garut untuk berpartisipasi aktif dalam pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 dengan memberikan data yang benar, lengkap, dan akurat kepada petugas resmi Badan Pusat Statistik (BPS).

Sebelumnya, Bupati Garut telah melepas para



Bupati Garut Abdusy Syukur Amin bersama petugas PPL, PML serta organik BPS. (Foto/Hartono)

petugas Sensus Ekonomi 2026 sekaligus mengimbau seluruh pemangku kepentingan (stakeholder) agar turut mendukung kelancaran pelaksanaan sensus dengan menyampaikan informasi kepada masyarakat mengenai pentingnya memberikan keterangan yang sesuai dengan kondisi sebenarnya. Pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 dijadwalkan ber-

▶▶Halaman 11

Tutup MTQ XXIII Provinsi Banten 2026

Wagub Dimiyati Serahkan Piala Bergilir Ke Bupati Tangerang

Banten, Jaya Pos

Wakil Gubernur (Wagub) Banten Achmad Dimiyati Natakusumah menutup Musabaqah Tilawatil Quran (MTQ) XXIII Tingkat Provinsi Banten Tahun 2026 di Halaman Masjid Raya Al-Bantani, KP3B, Curug, Kota Serang, Kamis (9/7/2026) malam. Juara umum diraih oleh Kafilah Kabupaten Tangerang.

Berdasarkan Surat Keputusan Dewan Hakim

Nomor 04/DH/MTQ-XXIII/ BTN/Kep./VII/2026 tentang Penetapan Peserta Terbaik, Juara Umum, dan Peringkat Kafilah Kabupaten/Kota menetapkan Kabupaten Tangerang ditetapkan sebagai Juara Umum MTQ XXIII Tingkat Provinsi Banten Tahun 2026 dengan perolehan nilai 759. Piala bergilir MTQ Provinsi Banten diserahkan langsung oleh Wagub



Wakil Gubernur Banten Dimiyati Natakusumah saat penutupan acara. (dok)

▶▶Halaman 11

Belitung Expo 2026 Catat Transaksi Rp 1,46 Miliar, UKM Jadi Pengerak Ekonomi Daerah

Belitung, Jaya Pos

Gelaran Belitung Expo 2026 yang berlangsung di kawasan Pantai Wisata Tanjungpandan, Kabupaten Belitung, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, selama lima hari, 1-5 Juli 2026, mencatat total nilai transaksi sebesar Rp1.462.840.710. Capaian tersebut dinilai menjadi indikator kuat meningkatnya akti-

vitasi ekonomi masyarakat sekaligus menunjukkan besarnya kontribusi pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) terhadap pertumbuhan ekonomi daerah.

Kepala Dinas Koperasi, UKM, Perdagangan, dan Tenaga Kerja (DKUKMPTK) Kabupaten Belitung, Annyta, didampingi Kepala Bidang Koperasi dan UKM Edi

Siswa, mengatakan nilai transaksi tersebut merupakan hasil akumulasi dari seluruh pelaku usaha yang berpartisipasi dalam Belitung Expo 2026.

"Belitung Expo 2026 berhasil menggerakkan roda perekonomian masyarakat. Nilai transaksi yang mencapai Rp1,46 miliar menjadi bukti bahwa kegiatan ini memberi-

kan dampak ekonomi nyata bagi para pelaku UMKM dan masyarakat," ujar Annyta kepada Jaya Pos di Tanjungpandan, Jumat (10/7).

Menurutnya, penyelenggaraan Belitung Expo tidak hanya menjadi ajang promosi produk lokal, tetapi juga menjadi ruang pemasaran yang

▶▶Halaman 11



Kadis KUKMPTK Annyta, Berserta Staf Foto Bersama Panitia Belitung Expo 2026. (Foto/Yus)

Gunakan Tehnik Under Cover, Seorang Pria Ditangkap Satresnarkoba Polres Binjai Beserta Barang Buktinya

Binjai, Jaya Pos

Satuan Reserse Narkoba Polres Binjai kembali menangkap seorang pria dengan inisial RAR (26) yang diduga sebagai penge-
dar narkoba jenis sabu-sabu, di Jalan Ir. H. Juanda Kelurahan Mencirim Kecamatan Binjai Timur, Kamis (2/7/26) pukul 02.30 wib dini hari,

Komitmen pemberantasan narkoba ini terus ditunjukkan polres Binjai, melalui operasi under cover oleh sat narkoba

sehingga berhasil menangkap seorang pria yang diduga sebagai bandar narkoba di wilayah hukum Polres Binjai, "ucap Kasat Narkoba AKP Ismail Pane, S.H., M.H.,

Penangkapan terhadap terduga ini diawali dengan adanya informasi dari masyarakat yang direspon langsung oleh Kasat Narkoba AKP Ismail Pane, S.H., M.H., untuk menindak lanjut informasi tersebut kemudian memerintahkan anggotanya untuk melakukan

penyelidikan.

"Barang bukti yang diamankan dari pelaku RAR (26) tersebut yaitu, 1 (satu) paket diduga narkotika jenis sabu-sabu yang dibungkus plastik klip transparan dengan berat bruto 10,07 gram serta 1 buah kaca pirem.,

"Atas perbuatannya, pelaku dijera dengan Pasal 114 ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo pasal 609 ayat (2) huruf a UU RI No. 1 Tahun 2023



Pelaku RAR (26) diduga pengedar narkotika jenis sabu-sabu. (Foto: ist)

tentang KUHP sebagaimana diubah dalam UU RI No. 1 Tahun 2026 tentang penyesuaian pidana. dengan Ancaman hukuman Penjara minimal 4 Tahun dan maksimal 12 tahun, tegas AKP Ismail Pane, S.H., M.H.,

Kapolres Binjai AKBP Mirzal Maulana, S.I.K., S.H., M.M., M.H., menegaskan keberhasilan pengungkapan ini merupakan bentuk keseriusan Polres Binjai dalam memerangi peredaran gelap narko-

tika di wilayah hukumnya.

"Kami berkomitmen penuh untuk memberantas narkoba serta peran aktif masyarakat sangat dibutuhkan dalam memberikan informasi demi menyelamatkan generasi muda," tegas Kapolres Binjai.

Masyarakat juga tetap diimbau untuk tidak ragu melaporkan aktivitas mencurigakan melalui layanan Call Center 110 Polri, ucap AKBP Mirzal. (Fatimah)

Menteri PU Pastikan Pelebaran 4 Lajur Jalan Serdang-Bojonegara-Merak Segera Terealisasi



Menteri PU Dody Hanggono didampingi Gubernur Banten Andra Soni. (dok)

Banten, Jaya Pos

Menteri Pekerjaan Umum (PU) Republik Indonesia Dody Hanggono memastikan pelebaran 4 lajur Ruas Jalan Nasional Serdang-Bojonegara-Merak (SBM) segera terealisasi. Pelebaran dilakukan untuk mengurai kemacetan, dengan target menjadi empat lajur dengan panjang mencapai hampir 32 kilometer.

Sementara Detail Engineering Design (DED) untuk pelebaran empat lajur tersebut telah disiapkan oleh Pemerintah Provinsi (Pemprov) Banten. "Tinggal mencari sumber pendanaannya. Untuk pembebasan lahan akan dibantu oleh Pak Wakil Bupati Muhammad Najib Hamas dan Pak Gubernur Andra Soni," kata Menteri PU Dody Hanggono.

Hal ini disampaikan Dody Hanggono saat meninjau langsung Jalan Raya Serdang-Bojonegara-Merak (SBM) yang mengalami darurat kemacetan, didampingi Gubernur Banten Andra Soni dan Wakil Bupati Serang Muhammad Najib Hamas.

Dody Hanggono menegaskan pelebaran ini bertujuan agar aktivitas masyarakat tidak terganggu oleh padatnya lalu lintas kendaraan industri. "Kami tetap mengutamakan masyarakat setempat. Anak sekolah, warga yang ke rumah sakit, dan pengguna jalan lainnya harus tetap bisa menggunakan jalan ini dengan aman," katanya.

Berdasarkan peninjauan, pemerintah baru mampu melakukan penambahan pelebaran jalan mencapai dua meter yang terbagi satu meter untuk sisi kiri dan satu meter untuk sisi kanan. Menurut Dody Hanggono, saat ini lahan yang dapat dimanfaatkan hanyalah sempadan jalan, sehingga pemerintah hanya mampu menambah pelebaran dua meter dengan panjang mencapai 32 kilometer.

"Sementara waktu lahan yang tersedia itu adalah sempadan. Jadi kita lebarkan 1 meter 1 meter, nanti total lebarnya menjadi 11 meter," terangnya.

Di tempat yang sama, Gubernur Banten Andra Soni mengatakan, jalan tersebut merupakan kewenangan pemerintah pusat yang selama ini menjadi keluhan masyarakat, karena lebar jalan tidak sesuai dengan standar kawasan industri.

Oleh karenanya, Andra Soni menegaskan perlunya upaya serius untuk melebarkan jalan agar lalu lintas dapat direalisasikan dengan baik. Saat ini kondisi jalan dinilai membahayakan pengguna jalan, khususnya masyarakat sekitar.

Untuk penyelesaian pelebaran jalan ini, Andra Soni menyebut harus dilakukan melalui kolaborasi baik dengan masyarakat hingga dengan pihak industri. "Industri juga punya kepentingan agar biaya logistik murah sehingga daya saing tetap terjaga," ujarnya.

Untuk tahap awal, lahan yang tersedia hanya 1 meter di sisi kanan dan 1 meter di sisi kiri. Lahan tersebut akan langsung dimanfaatkan. Sementara untuk target empat lajur, Pemerintah Provinsi Banten tahun ini telah menganggarkan penyusunan Detail Engineering Design (DED). "DED ini nanti akan diketahui kebutuhan lahannya berapa, dan berapa biaya pembangunannya. Insyaallah akhir tahun ini selesai," jelasnya.

Sementara Wakil Bupati Serang Muhammad Najib Hamas mengatakan, pelebaran Jalan Bojonegara menjadi empat lajur beserta pemasangan Penerangan Jalan Umum (PJU) merupakan kebutuhan yang sangat mendesak. "Ini karena jalur penting, satu paket berikut PJU yang menjadi kebutuhan yang sangat mendesak dan sudah ditunggu-tunggu oleh masyarakat maupun dunia industri," ujarnya.

Najib Hamas menjelaskan, jalan tersebut setiap hari dilalui kendaraan industri, warga, pelajar, dan akses menuju fasilitas kesehatan. Kondisi tersebut membuat arus lalu lintas rawan dan membahayakan pengguna jalan. "Nanti setelah DED baru kita akan diskusi dengan dinas terkait. Termasuk PJU ini menjadi bagian dari satu kesatuan pembangunan," katanya.

Sekadar diketahui, Ruas Jalan Nasional SBM merupakan akses utama yang setiap hari dilalui kendaraan industri, kendaraan umum, warga, anak sekolah, serta ambulans menuju fasilitas kesehatan. Kondisi ini menyebabkan kemacetan cukup parah, terutama pada jam berangkat dan pulang kerja.

Sepanjang ruas jalan juga terdapat kawasan industri, pelabuhan, dan lokasi tambang batu yang berkontribusi terhadap tingginya volume kendaraan berat. (Yan)

Sekda Labuhanbatu Menggelar Rapat Persiapan Pelaksanaan Dan Evaluasi Pelayanan Publik

Labuhanbatu, Jaya Pos

Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu melalui Bagian Organisasi Sekretariat Daerah menggelar Rapat Persiapan Pelaksanaan Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik (PEKPPP) Tahun 2026 di Ruang Data dan Karya, Kompleks Kantor Bupati Labuhanbatu, Rabu (08/07/2026).

Rapat dipimpin oleh Asisten Administrasi Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Labuhanbatu, Zaid Harahap, serta diikuti oleh perangkat daerah dan unsur penyelenggara pelayanan publik di lingkungan Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu.

Dalam arahnya, Zaid Harahap menyampaikan bahwa Kabupaten Labuhanbatu berhasil meraih Indeks Pelayanan Publik (IPP) Tahun 2025 sebesar 3,79 dengan kategori B. Capaian tersebut diharapkan menjadi motivasi bagi seluruh perangkat daerah untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat.

Menurutnya, pelaksanaan PEKPPP Tahun 2026 akan menitikberatkan pada enam aspek penilaian, yaitu kebijakan pelayanan, profesionalisme sumber daya manusia, sarana dan prasarana, sistem informasi penyelenggara pelayanan, konsultasi dan pengaduan, serta inovasi pelayanan publik.



Asisten Bersama Sekda. (Foto Kominfo)

Zaid juga mengajak seluruh Unit Lokus Evaluasi (ULE) agar mengikuti setiap tahapan penilaian secara optimal, memperkuat koordinasi, serta melengkapi seluruh dokumen pendukung sesuai ketentuan yang berlaku.

"Melalui rapat persiapan ini, seluruh ULE diharapkan mampu memperkuat koordinasi dan mengoptimalkan peran masing-masing anggota tim sehingga pelaksanaan PEKPPP Tahun 2026

dapat berjalan efektif dan memberikan dampak nyata terhadap peningkatan kualitas pelayanan publik kepada masyarakat," ujarnya.

Sebelumnya, Kepala Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Labuhanbatu, Hamamuddin Siregar, menjelaskan bahwa PEKPPP tidak hanya menilai kualitas pelayanan publik kepada masyarakat, tetapi juga mengukur tata kelola pelayanan yang dilaksanakan oleh Aparatur

Sipil Negara (ASN).

Ia menambahkan, pada pelaksanaan PEKPPP Tahun 2026, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemPAN-RB) telah menetapkan objek penilaian sebesar 30 persen dari seluruh unit penyelenggara pelayanan publik, meliputi organisasi perangkat daerah (OPD), puskesmas, UPTD, serta satu-satunya pendidikan.

Rapat kemudian dilanjutkan

kan dengan pemaparan teknis mengenai mekanisme pelaksanaan PEKPPP serta sesi diskusi yang dipimpin oleh Kepala Bagian Organisasi bersama seluruh peserta.

Turut hadir dalam kegiatan tersebut Plt. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, Camat Bilah Barat, Camat Pangkajene, perwakilan perangkat daerah, puskesmas, UPTD, serta perwakilan satuan pendidikan jenjang SD dan SMP di Kabupaten Labuhanbatu. (Y)

Keluarga Soroti Dugaan Penangkapan Tak Sesuai SOP oleh Polsek Tapung Hulu, Polisi Beri Penjelasan

Kampar, Jaya Pos

Kinerja Polsek Tapung Hulu menjadi sorotan setelah keluarga seorang pria berinisial S, warga Desa Tanah Datar, menduga proses penangkapan yang dilakukan terhadap S tidak sesuai dengan prosedur operasional standar (SOP).

Orang tua S, Tiorina, mengaku anaknya ditangkap dari rumah pada 21 Mei 2026 oleh dua pria berpakaian preman. Menurutnya, kedua orang tersebut tidak menunjukkan identitas maupun surat perintah penangkapan. Keluarga juga mengaku tidak menerima dokumen resmi apa pun saat S dibawa.

Tiorina mengatakan sempat mempertanyakan alasan



Kantor Polsek Tapung Hulu. (ist)

anaknya diborgol. Salah seorang pria yang mengaku bernama Rifki dan merupakan Bhabinkamtibmas Desa Intan Jaya menyebut S diduga terlibat pencurian mesin PLTD.

"Anak saya dibawa dari rumah dengan tangan di-

borgol oleh seseorang yang mengaku Bhabinkamtibmas bernama Rifki bersama seorang warga bernama Budi dari SP 6 Desa Intan Jaya. Saat itu tidak ada surat perintah penangkapan maupun surat lainnya yang diberikan kepada

keluarga," ujar Tiorina, Jumat (10/7/2026).

Ia mengaku keluarga sempat tidak mengetahui keberadaan S selama beberapa hari setelah penangkapan tersebut. Sekitar 10 hari kemudian, keluarga baru mendapat informasi melalui pesan suara WhatsApp dari nomor yang tidak dikenal yang menyebutkan bahwa S berada di sebuah Polsek, tanpa menjelaskan lokasi Polsek tersebut.

Hingga kini, pihak keluarga mengaku belum menerima pemberitahuan resmi dari kepolisian mengenai status penanganan perkara yang menjeratnya.

Menanggapi hal itu, Kapolsek Tapung Hulu melalui

Kanit Reskrim Polsek Tapung Hulu, IPDA Zulkarnaini, membantah adanya penangkapan langsung oleh polisi. Menurutnya, S terlebih dahulu diamankan oleh warga karena diduga tertangkap tangan melakukan tindak pidana, kemudian diserahkan ke Polsek Tapung Hulu bersama Bhabinkamtibmas. "S tertangkap tangan oleh masyarakat, kemudian masyarakat bersama Bhabinkamtibmas menyerahkannya kepada kami," kata IPDA Zulkarnaini, Jumat (10/7/2026).

Terkait keberatan keluarga mengenai surat perintah penangkapan, Zulkarnaini menjelaskan surat tersebut telah diserahkan kepada perangkat desa dan disertai berita acara penyerahan. (Dh)

Kabupaten Serang Raih Juara III MTQ ke-23 Tingkat Provinsi Banten 2026

Serang, Jaya Pos

Kabupaten Serang meraih Juara III Musabaqoh Tilawatil Qur'an (MTQ) XXIII tingkat Provinsi Banten Tahun 2026 yang berlangsung sejak 6 sampai 9 Juli 2026. Meski belum meraih juara umum, namun Kabupaten Serang sukses naik 3 peringkat yang sebelumnya hanya meraih urutan ke 6 MTQ Banten tahun 2025 lalu.

Sedangkan Juara Umum diraih juara bertahan Kabupaten Tangerang disusul Juara ke II Kota Tangerang yang diumumkan pada malam penutupan di Halaman Masjid Al Bantani Kawasan Pusat Pemerintahan Provinsi Banten (KP3B) Curug Kota Serang pada Kamis, 9 Juli 2026 malam. Secara resmi MTQ

XXIII Banten ditutup oleh Wakil Gubernur (Wagub) Banten, Ahmad Dimiyati Natakusuma.

Bupati Serang Ratu Rachmatuzkiah secara pribadi dan pemerintah daerah (pemda) menyampaikan terimakasih dan apresiasi setinggi-tingginya khususnya kepada Lembaga Pengembangan Tilawatil Qur'an (LPTQ) Kabupaten Serang yang merupakan leading sektornya. Selanjutnya para khalifah atau peserta MTQ tingkat Provinsi Banten yang mewakili Kabupaten Serang.

"Kemudian para pembina, para pelatih official yang tentu hari ini sudah bersama-sama dari beberapa hari lalu mengikuti MTQ tingkat Provinsi Banten,"ujarnya usai



Wakil Gubernur Banten Dimiyati Natakusumah menyerahkan piagam Penghargaan kepada Bupati Serang Ratu Rachmatuzkiah. (dok)

acara didampingi Wakil Bupati Serang Muhammad Najib Hamas, Sekretaris Daerah (Sekda), Zaldi Dhuhana, dan para Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Ratu Zakiah biasa disapa,

tak hentinya bersyukur berkat kerja keras, bimbingan, pembinaan yang sudah dilakukan secara selektif dan secara berjenjang sehingga Kabupaten Serang menghasilkan juara III. Raihan ini naik peringkat

yang mana Kabupaten Serang sebelumnya hanya mendapatkan peringkat ke 6. "Alhamdulillah kita naik 3 tingkat," ucapnya.

Menurut Ratu Zakiah meskipun keinginan Kabupaten Serang meraih Juara Umum MTQ III tingkat Provinsi Banten, akan tetapi tentu ini bisa dijadikan motivasi untuk semua pihak.

Adapun urutan juara pada MTQ XXII Provinsi Banten tahun 2026 yakni, Juara 1 Kabupaten Tangerang, Juara 2 Kota Tangerang, Juara 3 Kabupaten Serang, Juara 4 Kota Tangerang Selatan, Juara 5 Kota Cilegon, Juara 6 Kabupaten Lebak, Juara 7 Kota Serang, Juara 8 Kabupaten Pandeglang. (Yan)

Dewan Pers Percayakan RRI Gelar UKW Siber, Perkuat Profesionalisme Pers Digital



Penyerahan Surat Keputusan (SK) lisensi dilakukan Anggota Dewan Pers Maha Eka Swasta kepada Direktur Utama LPP RRI Hendrasmo di Kantor Pusat RRI, Jalan Medan Merdeka Barat, Jakpus, Selasa (7/7/2026). (Foto/Ins)

Jakarta, Jaya Pos

Dewan Pers resmi memberikan mandat kepada Lembaga Penyiaran Publik (LPP) Radio Republik Indonesia (RRI) untuk menyelenggarakan Uji Kompetensi Wartawan (UKW) Siber. Penyerahan Surat Keputusan (SK) lisensi dilakukan Anggota Dewan Pers Maha Eka Swasta kepada Direktur Utama LPP RRI Hendrasmo di Kantor Pusat RRI, Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Selasa (7/7/2026).

Dengan lisensi tersebut, RRI resmi bergabung dengan sejumlah lembaga yang telah memperoleh kewenangan dari Dewan Pers untuk melaksanakan Uji Kompetensi Wartawan Siber di seluruh Indonesia. Mandat ini sekaligus memperkuat peran RRI dalam mendorong peningkatan kualitas dan profesionalisme insan pers di era digital.

Anggota Dewan Pers Maha Eka Swasta mengatakan, lisensi diberikan setelah RRI berhasil menyusun modul Uji Kompetensi Wartawan Siber yang telah memenuhi standar Dewan Pers dan dapat digunakan pula oleh lembaga pengujian lainnya.

Direktur Utama LPP RRI Hendrasmo menyampaikan apresiasi atas kepercayaan yang diberikan Dewan Pers. Menurutnya, peningkatan kompetensi sumber daya manusia menjadi salah satu fokus utama RRI, meskipun lembaga penyiaran publik itu masih menghadapi keterbatasan anggaran.

Hingga kini, RRI bersama Dewan Pers telah menyelenggarakan sertifikasi kompetensi bagi sekitar 960 wartawan dan penyiar. Jumlah tersebut mencapai lebih dari separuh total wartawan dan penyiar yang dimiliki RRI.

Sebagai satu-satunya lembaga yang menyelenggarakan sertifikasi kompetensi wartawan radio di Indonesia, RRI terus memperkuat transformasinya menjadi media penyiaran multipatform tanpa meninggalkan kekuatan utamanya sebagai radio publik.

Transformasi tersebut mendapat respons positif dari masyarakat. Berdasarkan survei AC Nielsen 2024, RRI menguasai 46 persen pangsa pendengar radio nasional, menjadikannya sebagai stasiun radio dengan jumlah pendengar terbesar di Indonesia.

Capaian itu menunjukkan bahwa di tengah derasnya arus digitalisasi media, RRI tetap menjadi sumber informasi terpercaya bagi masyarakat sekaligus mampu beradaptasi dengan perkembangan teknologi melalui penguatan platform digital. Atas keberhasilan transformasi tersebut, Komisi VII DPR RI dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) pada awal Juni 2026 turut memberikan apresiasi kepada RRI. (AI)

Andalkan Kualitas dan Profesionalisme H. Manyar Bengkel Mobil dan Jual Beli Dump Truck



H. Manyar Bengkel Mobil dan Jual Beli Mobil Dam Truk

Tangerang, Jaya Pos

H. Manyar Bengkel Mobil dan Jual Beli Dump Truck yang berlokasi di Desa Keramat, Kecamatan Pakuhaji, Kabupaten Tangerang, Banten, terus memperkuat komitmennya dalam memberikan layanan perbaikan kendaraan serta penyediaan dump truck berkualitas bagi pelanggan.

Dipimpin langsung oleh H. Manyar, bengkel ini dikenal melayani berbagai kebutuhan perawatan dan perbaikan kendaraan, khususnya dump truck dan kendaraan niaga. Didukung tenaga mekanik yang berpengalaman dan profesional, setiap proses pengerjaan dilakukan dengan mengutamakan ketelitian, kualitas hasil, serta ketepatan waktu.

Beragam layanan tersedia di bengkel ini, mulai dari perbaikan mesin, servis sistem kaki-kaki, perbaikan body kendaraan, servis berkala, pengecatan (body repair), hingga modifikasi dan pembuatan body dump truck sesuai kebutuhan pelanggan.

H. Manyar juga melayani jual beli mobil dump truck dengan berbagai pilihan unit yang telah melalui pemeriksaan kondisi kendaraan sehingga siap digunakan. Pelanggan juga dapat berkonsultasi mengenai kebutuhan kendaraan usaha dengan harga yang kompetitif.

H. Manyar mengatakan bahwa kepercayaan pelanggan merupakan modal utama dalam mengembangkan usahanya. Karena itu, pihaknya terus berupaya menjaga kualitas pelayanan dengan mengedepankan kejujuran, tanggung jawab, dan hasil pekerjaan yang memuaskan.

Berkat pengalaman yang dimiliki serta komitmen terhadap mutu pekerjaan, H. Manyar Bengkel Mobil kini menjadi salah satu bengkel yang dipercaya oleh pelanggan dari wilayah Kabupaten Tangerang maupun daerah sekitarnya, baik untuk perbaikan kendaraan maupun kebutuhan pembelian dump truck.

Dengan alamat Desa Keramat, Kecamatan Pakuhaji, Kabupaten Tangerang, Banten. Informasi dan Pemesanan Telepon/WhatsApp: 0812-8038-7266. (Abd)

Bekas RSUD Soreang Bakal Dialihfungsikan Jadi Sekolah, Pemkab Bandung Siapkan Kajian

Kab. Bandung, Jaya Pos

Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bandung berencana mengalihfungsikan gedung bekas Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Soreang menjadi fasilitas pendidikan. Langkah tersebut dilakukan untuk memenuhi kebutuhan ruang belajar di Kecamatan Soreang yang terus meningkat, sekaligus memanfaatkan bangunan yang selama ini tidak lagi digunakan.

Gedung bekas RSUD Soreang telah lama kosong sejak pelayanan kesehatan dipindahkan ke RSUD Otto Iskandardinata (Otista). Agar aset daerah tersebut tidak terbengkalai, Pemkab Bandung menyiapkan rencana konversi bangunan menjadi sekolah.

Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bandung, Asep Kusumah, mengatakan pemanfaatan gedung bekas rumah sakit dinilai lebih efektif dibanding membangun sekolah baru dari awal. Selain menghemat anggaran, langkah tersebut juga dapat mempercepat penyediaan sarana pendidikan bagi masyarakat.

"Kebutuhan ruang kelas di Soreang saat ini cukup mendesak karena jumlah siswa terus bertambah setiap tahun. Daripada gedung ini kosong dan rusak, lebih baik dimanfaatkan untuk fasilitas pendidikan," kata Asep saat ditemui di Soreang, Kamis (9/7/2026).

Menurutnya, lokasi bekas RSUD Soreang yang berada di pusat kota juga menjadi nilai tambah. Akses menuju lokasi dinilai mudah dijangkau kendaraan umum sehingga akan memudahkan mobilitas siswa maupun tenaga pendidik.



Kadisdik Kabupaten Bandung Asep Kusumah saat memberikan keterangan kepada wartawan, Soreang Kamis 9/7/2026 (Foto/ Hen)

Saat ini, Pemkab Bandung telah berkoordinasi dengan Dinas Kesehatan serta Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Bandung terkait status aset dan proses perubahan fungsi lahan. Tahapan administrasi dan perizinan masih terus berjalan.

Asep mengungkapkan, terdapat dua opsi yang sedang dikaji untuk pemanfaatan gedung tersebut. Opsi pertama adalah membangun SMP Negeri baru karena jumlah sekolah menengah pertama di Soreang dinilai belum mampu menampung lulusan SD setiap tahunnya.

Sementara opsi kedua adalah menjadikan bangunan tersebut sebagai SMK dengan program keahlian kesehatan atau farmasi. Konsep ini dinilai memungkinkan karena sebagian fasilitas bekas rumah sakit, seperti ruang perawatan dan laboratorium, masih dapat dimanfaatkan.

"Kami masih melakukan kajian teknis. Tim dari Dinas PU, Dinas Kesehatan, dan Dinas Pendidikan sudah turun ke lapangan untuk mengecek kondisi struktur bangunan, instalasi listrik, hingga jaringan air. Kalau dinilai layak, beberapa ruang rawat inap bisa di-

ubah menjadi ruang kelas atau laboratorium," ujarnya.

Pemkab Bandung menargetkan proses renovasi dapat dimulai pada tahun anggaran 2027. Jika seluruh tahapan berjalan sesuai rencana, sekolah baru tersebut diharapkan sudah bisa menerima peserta didik dalam dua tahun ke depan.

Rencana alih fungsi gedung bekas RSUD Soreang mendapat respons positif dari masyarakat. Selama ini bangunan tersebut dinilai terbengkalai dan kerap menjadi lokasi yang sepi.

Salah seorang warga

Soreang, Yanti, mengaku mendukung penuh rencana tersebut. Menurutnya, keberadaan sekolah baru sangat dibutuhkan karena jumlah penduduk di Kecamatan Soreang terus bertambah, sementara fasilitas pendidikan tingkat SMP maupun SMA/SMK masih terbatas.

"Kalau rencana ini benar terealisasi, kami sebagai warga Soreang sangat bersyukur. Anak-anak nanti bisa sekolah lebih dekat. Daripada bangunannya terbengkalai, lebih baik dimanfaatkan untuk kepentingan masyarakat," ujar Yanti. (Hen)

Rapur DPRD Kabupaten Sukabumi, Ini Agenda Penting Yang Disampaikan

Sukabumi, Jayapos

DPRD Kabupaten Sukabumi menggelar rapat paripurna dengan agenda penyampaian laporan hasil reses kedua Tahun 2026, nota pengantar Rancangan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2027, serta pengumuman perubahan susunan alat kelengkapan DPRD dari Fraksi PDI Perjuangan. Rapat berlangsung di Ruang Paripurna DPRD Kabupaten Sukabumi, Kamis (9/7/2026).

Bupati Sukabumi H Asep Japar diwakili Wakil Bupati H Andreas menyampaikan nota pengantar KUA-PPAS 2027.

Dalam paparannya, Wabup Andreas menegaskan arah pembangunan Kabupaten Sukabumi pada tahun depan akan difokuskan pada



Wakil Bupati Sukabumi H.Andreas (Kanan) Bersama Para Pimpinan DPRD Kabupaten Sukabumi. (Foto/ Humprov)

penyiapan ekosistem yang mendukung penguatan sektor agroindustri dan pariwisata sebagai penggerak utama pertumbuhan ekonomi daerah.

Menurut Wabup, penyusunan KUA-PPAS 2027 mempertimbangkan kemampuan fiskal daerah, pemenuhan lanja wajib, standar pelayanan

minimal, hingga pembiayaan berbagai program prioritas agar pembangunan tetap berjalan efektif dan berkelanjutan.

Dalam sidang tersebut, DPRD bersama Pemerintah Kabupaten Sukabumi juga menyetujui Rancangan Peraturan Daerah tentang Penye-

lenggaraan Ketertiban Umum, Ketenteraman Masyarakat, dan Pelindungan Masyarakat untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah.

"Regulasi tersebut diharapkan menjadi landasan hukum dalam menciptakan kehidupan masyarakat yang tertib, aman, nyaman, dan terlindungi," kata Wabup.

Ketua DPRD Kabupaten Sukabumi Budi Azhar Muta-wali mengatakan seluruh hasil reses anggota DPRD dari enam daerah pemilihan telah disampaikan kepada pemerintah daerah sebagai bahan penyusunan program pembangunan.

"Hasil reses kami diharapkan menjadi masukan bagi pemerintah daerah untuk menyempurnakan program pembangunan sesuai kebutuhan masyarakat. Banyak

aspirasi yang disampaikan, mulai dari percepatan pembangunan, pendidikan, hingga berbagai persoalan yang selama ini muncul dalam rapat dengar pendapat bersama mitra kerja," ujarnya.

Ketua juga menjelaskan perubahan susunan alat kelengkapan dewan yang diumumkan dalam rapat merupakan hal yang diperbolehkan sesuai tata tertib DPRD selama hanya bergeser pada posisi anggota.

Ia menambahkan pembahasan KUA-PPAS Tahun Anggaran 2027 akan segera dilanjutkan di tingkat pembahasan bersama antara DPRD dan pemerintah daerah.

"Syaallah pembahasannya bisa selesai dalam satu minggu dan setelah itu akan ada tahapan lanjutan," katanya. (Yud)

3000 Lansia Bekasi Tampilkan Keceriaan Untuk Perkuat Komitmen Sidaya

Bekasi, Jaya Pos

Lansia tetap mampu berkarya, berprestasi dan berkontribusi bagi masyarakat. Semangat itu ditampilkan melalui berbagai pertunjukan dan pameran karya dalam Kriyaan Lansia Kota Bekasi Tahun 2026 yang digelar Rabu (8/7). 3000 lebih lansia Kota Bekasi memadati arena GOR Bang Yan, Kota Bekasi, untuk memeriahkan agenda puncak peringatan Hari Lanjut Usia Nasional tersebut.

Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/Kepala BKKBN, Dr. Wihaji, S.Ag., M.Pd bersama dengan Wali Kota Bekasi, Tri Adhianto hadir menyapa dan memberikan motivasi kepada para lansia secara langsung. Turut mendampingi adalah segenap perangkat Kemendukbangga/BKKBN, Kepala Perwakilan BKKBN

Provinsi Jawa Barat, Kepala Dinas Sosial Jawa Barat, Forkopimda Kota Bekasi, Kepala DPPKB Kota Bekasi, serta motivator sekaligus pendiri lembaga pelatihan ESQ Leadership Center, Ari Ginanjar Agustian.

Wihaji menyampaikan bahwa Lansia Berdaya (SIDAYA) menjadi salah satu program prioritas nasional Kemendukbangga/BKKBN. Program ini diwujudkan melalui 4 program pengembangan, diantaranya adalah Sekolah Lansia. Pihaknya menilai persoalan terbesar yang banyak dialami lansia bukan hanya kondisi kesehatan, melainkan rasa kesepian. Karena itu, Sekolah Lansia diharapkan menjadi ruang interaksi sosial yang mampu mengurangi isolasi sosial sekaligus meningkatkan kualitas hidup para lanjut usia. "Semua lapisan masyarakat menjadi perhatian kami,



Mendukbangga/Kepala BKKBN, Wihaji, bersama dengan Wali Kota Bekasi, Tri Adhianto hadir menyapa dan memberikan motivasi kepada para lansia secara langsung. (Foto/Mamay)

termasuk lansia. Sekolah Lansia harus terus dikawal agar edukasi dapat diberikan secara lengkap," ujar Wihaji.

Sementara itu, Walikota Bekasi meneguhkan komitmen mendukung SIDAYA dengan terus meningkatkan jumlah sekolah lansia di Kota Bekasi. Saat ini Kota Bekasi telah memiliki 22 Sekolah Lansia yang tersebar di

seluruh kecamatan. Jumlah peserta didik juga meningkat signifikan dari 2.136 menjadi 3.436 orang di tahun 2026, yang mengikuti jenjang pembelajaran S1, S2, hingga S3 di Sekolah Lansia. "Lansia perlu diberikan ruang dan kesempatan yang sama dengan unsur masyarakat lain untuk berpartisipasi dalam pembangunan daerah. Pemerintah

Kota Bekasi terus berupaya mengadakan Sekolah Lansia di setiap kecamatan agar semakin banyak warga lanjut usia yang mendapatkan ruang belajar dan beraktivitas," pungkasnya

Program Sekolah Lansia sendiri merupakan pendidikan nonformal yang dikembangkan Kemendukbangga/BKKBN sebagai bagian dari pembelajaran sepanjang hayat bagi warga lanjut usia. Program ini bertujuan membentuk lansia yang SMART (Sehat, Mandiri, Aktif, Produktif, dan Bermartabat) melalui pembelajaran kesehatan, sosial, spiritual, keterampilan, hingga pemberdayaan ekonomi. Selain meningkatkan pengetahuan dan kemandirian, Sekolah Lansia juga dirancang menjadi ruang interaksi sosial untuk mencegah kesepian yang kerap menjadi persoalan utama pada usia lanjut. (Mamay)



Diterbitkan Oleh:

PT. Media Cipta Jaya Selaras

SK MENKUM & HAM RI:

Nomor: AHU-19831.40.10.2014

Hak Merek Hukum & HAM No. IDM000299337

NPWP No: 70.947.655.0-001.000

SIUP No: 07715-05/PM/1.824.271

Nomor Induk Berusaha (NIB): 0220104340564

REDAKSI:

Jl. Komplek Depag Blok G2 No. 83 RT. 012 RW. 003

Kelurahan Kedaung, Kaliangke, Jakarta Barat

Telp: (021) 23095745

e-mail: harianjayapos@yahoo.co.id

Website: www.harianjayapos.com

Pemimpin Umum:

Drs. John Hotman Malau, M.Si

Wakil Pemimpin Umum:

Leonardus Pasaribu, SH.

Pemimpin Redaksi/P. Jawab: Pemimpin Perusahaan:

Toni Limbong, SH. Febril Oloan Seim Brando, S.AK

Wakil Pemimpin Redaksi: Sekretaris Redaksi:

Anrico Pasaribu, ST., SH. Jaya Hasni S.

Redaktur Pelaksana: Manager Pemasaran/Iklan:

Pahotan Sinaga Nadia Margaretha

DEWAN REDAKSI:

Toni Limbong, SH, Anrico Pasaribu, ST, SH

Pahotan Sinaga, Dede Rostini

REDAKTUR EKSEKUTIF:

A. Ristanto

REDAKTUR:

Dede Rostini

DESAIN GRAFIS/IT:

Agus Wiro

PHOTO GRAPHER

Hengki Lumbantoruan

Sumatera Utara: Riau:

Rikkot Manik

Sumatera Selatan: Bangka Belitung:

..... Yustami Al

Jambi: Sumatera Barat:

Kusuma Inrdra Wijaya Zakirman

Banten: Bengkulu:

Guntur Sihombing Japri

DKI Jakarta: Lampung:

Jama Berutu Suhaili

Jawa Tengah: Jawa Barat:

M. Sofi Hendry Hutagalung

Jawa Timur: Sulawesi Selatan:

Wiro Utomo Muh. Hakim

Kalimantan Tengah: Sulawesi Tengah

Mandau Suwandi Heriyanti

Kalimantan Barat: Kalimantan Timur

Suhardi

STAF REDAKSI:

JS. Purba | Jama Berutu | Jitro Limbong | Gurning |

Jiston Sitohang | Sumihar, SH | Michael J Manurung |

Bedman Tambunan

LITBANG:

Lamsir Limbong

SIRKULASI:

Nelson Hutapea

PENASEHAT HUKUM:

Andar Situmorang SH. MH. | Anrico Pasaribu, ST., SH.

PENASEHAT:

Tom Pasaribu, Andar Situmorang, SH.

ML. Carlos Melgares Varon, P.hd.

Dr. Ronsen Pasaribu, SH, MH.

REKENING BANK:

- Bank Rakyat Indonesia (BRI) KCP Pramuka

Rek. No. : 1148-01-000156-30-1

a/n PT Media Cipta Jaya Selaras

- Bank Rakyat Indonesia (BRI) KCP Daan Mogot

Rek. No. : 0379-01-002054-50-7

a/n Toni Limbong

- Bank BCA Cab. Daan Mogot

Rek. No. : 1984084008

a/n Toni Limbong

PERCETAKAN: PT. Aliansi Temprina Nyata Grafika

Alamat: Jl. Raya Benda No. 26C, Rawa Bokor, Kota Tangerang

Telp: (021) 5553472, Fax: (021) 5553473

(Isi diluar tanggungjawab percetakan)

Mobil Siaga Desa Gelam Jaya Siaga 24 Jam, Perkuat Layanan Kesehatan dan Kedaruratan bagi Warga

Tangerang, Jaya Pos

Pemerintah Desa Gelam Jaya, Kecamatan Pasar Kemis, Kabupaten Tangerang, terus memperkuat pelayanan publik melalui penyediaan Mobil Siaga Desa yang beroperasi selama 24 jam. Fasilitas tersebut disiapkan untuk membantu masyarakat, terutama dalam kondisi darurat kesehatan maupun kebutuhan rujukan pasien ke rumah sakit.

Sekretaris Desa Gelam Jaya, Sururi, M.S., mengatakan keberadaan Mobil Siaga Desa merupakan salah satu bentuk komitmen pemerintah desa dalam memberikan pelayanan yang cepat, mudah diakses, dan bermanfaat bagi seluruh masyarakat.

"Mobil Siaga Desa Gelam Jaya selalu siap digunakan oleh masyarakat yang membutuhkan. Harapan kami, kendaraan ini dapat memberikan manfaat nyata, terutama untuk mengantar pasien ke rumah sakit maupun keperluan darurat lainnya," ujar Sururi saat ditemui di Kantor Desa Gelam Jaya, Selasa (7/7/2026).

Menurutnya, layanan Mobil Siaga Desa dapat dimanfaatkan warga selama 24 jam dengan melakukan koordinasi melalui Pemerintah Desa maupun petugas yang telah ditunjuk. Dengan sistem tersebut, masyarakat diharapkan dapat memperoleh akses transportasi yang cepat saat menghadapi kondisi darurat. Ia menambahkan, keberadaan Mobil Siaga Desa merupakan bagian dari upaya Pemerintah Desa Gelam Jaya



Sururi MS Sekdes Desa Gelam Jaya kecamatan Pasar kemis Tangerang Banten. (Foto/Abd)

dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik, khususnya di bidang kesehatan dan pelayanan sosial. Program ini juga menjadi bentuk kehadiran pemerintah desa dalam memberikan rasa aman dan kepastian pelayanan kepada masyarakat.

"Pelayanan kepada masyarakat menjadi prioritas kami. Karena itu, kami beru-

paya memastikan Mobil Siaga Desa selalu dalam kondisi siap digunakan kapan pun dibutuhkan," katanya.

Selain mendukung pelayanan kesehatan, Mobil Siaga Desa juga diharapkan dapat membantu berbagai kebutuhan sosial masyarakat yang memerlukan transportasi cepat, sehingga warga tidak mengalami kendala ketika

menghadapi situasi mendesak.

Pemerintah Desa Gelam Jaya juga mengajak seluruh masyarakat untuk bersama-sama menjaga dan memanfaatkan fasilitas tersebut secara bijaksana agar keberadaannya dapat terus memberikan manfaat bagi warga secara berkelanjutan.

Melalui penyediaan Mo-

bil Siaga Desa yang beroperasi tanpa henti selama 24 jam, Pemerintah Desa Gelam Jaya menunjukkan komitmennya dalam menghadirkan pelayanan publik yang responsif, humanis, dan berpihak pada kebutuhan masyarakat, khususnya di bidang kesehatan dan penanganan keadaan darurat.

(Abd)

Kabid Pariwisata Disparpora Mukomuko: Destinasi Wisata Daerah Belum Menjadi Andalan PAD, Pengembangan Terus Digenjot

Mukomuko, Jaya Pos

Pemerintah Kabupaten Mukomuko melalui Dinas Pariwisata, Kepemudaan, dan Olahraga (Disparpora) terus berupaya mengembangkan berbagai destinasi wisata di daerah. Namun, hingga saat ini sektor pariwisata belum menjadi penyumbang utama Pendapatan Asli Daerah (PAD) karena masih terkendala keterbatasan sarana, prasarana, serta regulasi.

Kepala Dinas Pariwisata, Kepemudaan, dan Olahraga Mukomuko Ujang Selamat melalui Kepala Bidang Pariwisata, Andesa Wijaya, mengatakan Kabupaten Mukomuko memiliki banyak potensi destinasi wisata yang layak dikembangkan. Meski demikian, sebagian besar objek wisata tersebut masih memerlukan pembenahan agar mampu menarik lebih banyak wisatawan.

"Objek wisata di Kabupaten Mukomuko jumlahnya cukup banyak. Ke depan, kami akan terus berupaya melakukan pengembangan



Disparpora terus kembangkan Destinasi Objek Wisata di Mukomuko (9/7/2026) . (Foto/Dok. Japri)

secara bertahap dan efektif. Memang masih terdapat berbagai kekurangan yang harus dibenahi agar sektor pariwisata mampu berkembang dan mendukung visi pembangunan menuju Indonesia Emas," kata Andesa Wijaya, Rabu (9/7).

Menurutnya, salah satu fokus pemerintah daerah saat ini adalah meningkatkan kualitas fasilitas pendukung

di kawasan wisata. Perbaikan infrastruktur, penyediaan sarana umum, hingga peningkatan kenyamanan pengunjung dinilai menjadi faktor penting untuk meningkatkan daya tarik destinasi wisata.

Ia mengakui, hingga saat ini sebagian besar objek wisata di Mukomuko belum dapat dijadikan sebagai sumber utama peningkatan PAD.

"Ada beberapa destinasi

yang sebenarnya berpotensi menjadi andalan. Namun, kami mengakui minat wisatawan masih belum optimal karena keterbatasan sarana dan prasarana yang tersedia," ujarnya.

Andesa menambahkan, Disparpora juga akan berupaya memperoleh dukungan anggaran dari pemerintah pusat guna mempercepat pembangunan kawasan wisata, sebagaimana pernah diperoleh pada tahun-tahun sebelumnya.

"Kami akan terus melakukan koordinasi dan melobi pemerintah pusat agar memperoleh dukungan pendanaan untuk pengembangan destinasi wisata. Harapannya, sektor pariwisata di Mukomuko ke depan mampu memberikan kontribusi nyata terhadap perekonomian daerah," jelasnya.

Selain persoalan infrastruktur, pemerintah daerah juga belum dapat menerapkan pungutan retribusi di sejumlah objek wisata karena masih menunggu payung hukum berupa Peraturan Daerah (Per-

da). "Saat ini kami belum berani melakukan pemungutan retribusi karena regulasi yang menjadi dasar hukumnya masih dalam proses. Kami masih menunggu Perda sebagai landasan hukum sehingga pelaksanaannya nanti memiliki kepastian hukum," terang Andesa.

Meski demikian, ia menyebut sejumlah destinasi wisata di Kabupaten Mukomuko masih cukup diminati oleh wisatawan lokal maupun pengunjung dari daerah sekitar. Namun, menurutnya, peningkatan kunjungan wisatawan lokal tersebut belum menjadi target utama pengembangan sektor pariwisata daerah.

Pemerintah Kabupaten Mukomuko berharap, dengan peningkatan infrastruktur, tersedianya regulasi yang memadai, serta dukungan anggaran dari pemerintah pusat, sektor pariwisata dapat berkembang lebih optimal dan pada akhirnya menjadi salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah yang berkelanjutan. (Japri)

Perwakilan Sumatera Utara: Rikkot Manik (Kepala), Ir Rudy Limbong MT (Wakil), Isnani, Lenon Radot Tampubolon, Erwinsa Sinaga, Hunter Dominikus Samosir | **Biro Medan:** | **Biro Binjai:** Siti Fatimah Hasibuan (Kepala) | **Biro Langkat:** Abdul Rahman (Kepala) | **Biro Deli Serdang:** Horasman Limbong (Kepala), Rahmadani | **Biro Simalungun/P. Siantar:** Jhon Edward Sargih SH (Kepala), Ramlan Sirait | **Biro Labuhanbatu/Labusel:** Gatti H Tumanggor (Kepala) **Biro Belitung/Belitung Timur:** Yustami Al (Kepala) | **Biro Padang Panjang:** Zakirman (Kepala), Denny Alinur | **Biro Bukittinggi :** Zakirman (Kepala), Denny Alinur | **Biro Tanjab Barat:** Kesuma Indrawijaya (Kepala) | **Biro Muko Muko:** Japri (Kepala), Aldo Surya Elwasa Putra | **Biro Way Kanan:** Suhaili (Kepala) | **Biro Lampung Timur:** - | **Perwakilan Banten:** | **Biro Padeglang:** Sofyandri | **Biro Kabupaten Tangerang:** Guntur Sihombing (Kepala), Abdullah Muhadi | **Biro Tangerang Selatan:** Ferry Dwi Darmawan (Kepala) | **Perwakilan Jawa Barat:** Hendry Hutagalung (Kepala) | **Biro Bekasi:** Sabar Sinaga (Kepala) | **Biro Kabupaten Sukabumi:** Yudi Suyudi (Kepala) | **Biro Kab Bandung:** Hendry Hutagalung (Kepala) | **Biro Ciamis/Pengandaran/Banjar:** Mamay (Kepala) | **Biro Garut:** Hartono (Kepala) | **Biro Peka-longan:** M Sofii (Kepala) | **Biro Kab Mojokerto :** Nur As'adi (Kepala), Buaji | **Biro Trenggalek:** Heru Wijaya SPd (Kepala) | **Biro Sidoarjo:** Wiro Utomo (Kepala) | **Biro Pasuruan:** Wiro Utomo (Kepala) | **Perwakilan Kalimantan Barat :** Suhardi | **Perwakilan Kalimantan Tengah:** Mandau Suwandi (Kepala), Yuel | **Biro Tolitoli:** Hariyanti (Kepala) | **Perwakilan Sulawesi Selatan:** Muh Hakim (Kepala)

Sebut Pedagang Belum Tempati Kios Halaman 7 **Kasus MBA di Pangandaran Terus Bergulir Halaman 7**

pati kios untuk kembali berdagang. Namun hingga saat ini sebagian besar pedagang belum menempati kios yang telah disediakan," katanya.

Untuk mempercepat pemanfaatan bangunan relokasi, pemerintah kecamatan kembali menjadwalkan rapat koordinasi bersama para pedagang pada Senin (6/7/2026)

guna mencari solusi agar kios segera difungsikan.

Sementara itu, pengelola Pasar Serbelawan, Darma Saragih, mengatakan pihaknya terus membuka akses ke kawasan relokasi serta melakukan pengawasan terhadap seluruh fasilitas yang tersedia.

la juga membantah isu

yang menyebut bangunan relokasi digunakan sebagai lokasi kegiatan negatif.

"Tidak benar jika bangunan relokasi dijadikan tempat kegiatan negatif. Kami rutin melakukan pemantauan dan penjagaan di lokasi," tegas Darma.

Pemerintah Kecamatan Dolok Batu Nanggar mengim-

bau masyarakat agar menyikapi setiap informasi secara bijak dan mengacu pada fakta di lapangan. Pemerintah juga mengajak seluruh pihak mendukung upaya mengaktifkan kembali Pasar Serbelawan demi memulihkan perekonomian pedagang dan pelayanan kepada masyarakat.

(Rd)

Mapolres Pangandaran untuk mendampingi kliennya yang diminta keterangan oleh penyidik.

Menurutnya, proses pemeriksaan ini merupakan bagian dari rangkaian penyelidikan yang kini diambil alih oleh pihak Polda Jabar. Fokus pemeriksaan hari ini adalah mendalami total kerugian yang dialami oleh para korban. "Kebetulan hari ini ada beberapa orang yang diminta keterangan terkait kerugian yang diderita oleh para korban dari MBA tersebut. Besok juga masih ada kelanjutan pemanggilan untuk korban lainnya dalam peristiwa yang sama," ujar Wawan kepada para awak media beberapa waktu lalu.

Didik menegaskan bahwa kliennya yang merupakan anggota DPRD Kabupaten Pangandaran aktif tersebut, juga merupakan korban dalam puseur aplikasi yang kini telah macet (scam) tersebut.

Menurut Didik, posisi kliennya hingga saat ini masih sebatas saksi, baik untuk laporan di kepolisian terkait dugaan penyebaran berita bohong sebagaimana dimaksud pasal 28 ayat 1 jo pasal 45a UU ITE. Selain itu, status saksi juga berkaitan dengan undang-undang terkait P2SK pasal 237 jo pasal 305 UU No 4 tahun 2023.

Pihaknya mendesak penyidik Polda Jawa Barat untuk membongkar aktor utama di balik aplikasi MBA. Hal itu termasuk pembuat aplikasi, admin, hingga pemegang kontrol sistem tersebut. "Kami inginnya fokus penyelidikan tidak hanya ke Pak Dadang klien saya tetapi ke orang-orang yang memang kompeten untuk diminta pertanggungjawaban. Siapa yang membuat aplikasi MBA? Siapa adminnya dan siapa yang memegang kontrolnya? Ini sudah berjalan berbulan-bulan lalu," ujar Didik kepada awak media, Selasa (30/6).

Belitung Expo 2026 Catat Transaksi Rp 1,46 Miliar Halaman 7

efektif bagi UMKM untuk memperluas pasar, meningkatkan penjualan, serta memperkuat daya saing produk unggulan Belitung.

Annyta menegaskan, sektor UMKM masih menjadi salah satu pilar utama penggerak ekonomi daerah karena mampu menciptakan lapangan usaha sekaligus meningkatkan pendapatan masyarakat.

Berdasarkan data DKUK-MPTK Kabupaten Belitung, transaksi terbesar berasal dari klaster jajanan kecil-kecilan dengan nilai mencapai Rp273.493.000.

oleh antusiasme masyarakat yang sangat besar selama pelaksanaan Belitung Expo.

Selain warga Belitung, pengunjung juga datang dari berbagai daerah seperti Jakarta, Bandung, Palembang, dan Pulau Bangka.

Menurutnya, hampir seluruh stan kuliner dipadati pengunjung yang menikmati beragam produk UMKM sambil berwisata di Pantai Tanjungpandan, salah satu destinasi wisata andalan Kabupaten Belitung.

lat Nasik, hingga Membalong. Pantai Tanjungpandan sendiri dikenal sebagai salah satu ikon wisata Belitung yang memiliki nilai sejarah panjang sejak masa kolonial dan hingga kini menjadi pusat kegiatan wisata, ekonomi kreatif, festival budaya, serta hiburan masyarakat.

Berdasarkan data penjualan karcis masuk Pantai Wisata Tanjungpandan, jumlah pengunjung selama pelaksanaan Belitung Expo 2026 mencapai 18.100 orang.

miliar menunjukkan bahwa kegiatan tersebut mampu menggerakkan sektor ekonomi masyarakat sekaligus meningkatkan daya beli masyarakat Belitung.

"Dari pantauan di lapangan, hampir seluruh stan kuliner dipenuhi pengunjung. Hal ini menunjukkan daya beli masyarakat masih cukup baik dan Belitung Expo mampu menjadi penggerak ekonomi lokal. Bahkan beberapa pelaku usaha kuliner khas Belitung mengaku berhasil membukukan omzet hingga ratusan juta rupiah selama kegiatan berlangsung," kata Johan Hanibal Palit

Wawan mengungkapkan, jumlah masyarakat yang terjerat aplikasi ini diperkirakan mencapai sekitar 3.000 orang. Namun, untuk efektivitas penyelidikan, pihak kepolisian saat ini baru mengambil sampel dari beberapa korban terlebih dahulu.

Untuk pemeriksaan kali ini, Wawan mengaku tengah mengawal delapan orang korban. Mengenai nominal kerugian, jumlahnya sangat bervariasi dari tiap individu karena bersifat fluktuatif. Berdasarkan hitungan kasar sementara, total kerugian dari delapan orang yang dipiksanya hari ini diperkirakan mencapai Rp 400 juta.

Didik membenarkan tuduhan bahwa kliennya melakukan penghimpunan dana masyarakat ataupun menyebarkan berita bohong secara sengaja. Buktiannya, menjelang aplikasi tersebut macet, Dadang sempat memenuhi undangan rapat klarifikasi di OJK Tasikmalaya pada 23 Januari 2026. Karena tidak ada peringatan resmi dari OJK saat itu bahwa aplikasi bermasalah, Dadang bahkan terus menambah modal (top up). Transaksi terakhir dilakukan pada 3 Februari 2026.

Didik membenarkan tuduhan bahwa kliennya melakukan penghimpunan dana masyarakat ataupun menyebarkan berita bohong secara sengaja. Buktiannya, menjelang aplikasi tersebut macet, Dadang sempat memenuhi undangan rapat klarifikasi di OJK Tasikmalaya pada 23 Januari 2026. Karena tidak ada peringatan resmi dari OJK saat itu bahwa aplikasi bermasalah, Dadang bahkan terus menambah modal (top up). Transaksi terakhir dilakukan pada 3 Februari 2026.

Wali Kota Banjar Kunjungi Rumah Duka Halaman 7

lesaikan persoalan ini secara kekeluargaan dengan pihak pemberi kerja.

Wali Kota Banjar, Ir. H. Sudarsono, menyambangi rumah duka pekerja yang meninggal dunia akibat insiden ambruknya tower setinggi 40 meter di Kompleks Perkantoran Purwaharja, Sabtu (4/7).

Turut hadir mendampingi Kepala BPKPD Kota Banjar. "Atas nama Pemerintah Kota Banjar dan pribadi, Saya menyampaikan turut berduka cita yang sedalam-dalamnya kepada keluarga yang ditinggalkan. Semoga almarhum husnul khotimah dan keluarga diberi ketabahan serta kekuatan dalam menghadapi musibah ini," ujar Sudarsono kepada keluarga yang ditinggalkan.

Keluarga korban memilih jalur damai dan menganggap peristiwa ini sebagai musibah yang tidak terhindarkan.

Hanan membenarkan bahwa perwakilan pemberi kerja akan memberikan uang duka sebesar Rp2 juta. Ketika dikonfirmasi mengenai sisa upah atau gaji almarhum sebesar Rp1 juta yang kabarnya belum diterima, Hanan mengaku belum mengetahui secara pasti dan belum mengusut hal tersebut lebih lanjut karena fokus pada masa berkabung.

Mantan anggota DPRD Belitung sekaligus pengamat pemerintahan dan pembangun, Johan Hanibal Palit, mengapresiasi keberhasilan DKUKMPTK Kabupaten Belitung dalam menyelenggarakan Belitung xpo 2026.

Menurutnya, capaian transaksi lebih dari Rp1,46

tidak pernah memberikan perintah resmi untuk pembongkaran pada hari kejadian.

Terkait waktu pembongkaran, Ian mengonfirmasi bahwa aktivitas di menara tersebut sebenarnya sudah terpantau sejak beberapa minggu sebelumnya, terutama pada akhir pekan.

Dalam kesempatan yang sama, Ian menyampaikan rasa belasungkawa yang mendalam kepada keluarga kedua korban yang meninggal dunia akibat insiden maut tersebut.

Sebagai tim advokat, Wawan berharap kasus aplikasi MBA ini masih bisa menemukan titik terang bagi para korban. Pihaknya tetap membuka pintu penyelesaian secara kekeluargaan agar hak-hak korban bisa kembali.

Namun, jika proses mediasi menemui jalan buntu, ia memastikan kasus ini akan terus dikawal hingga ke meja hijau. "Harapan kami mudah-mudahan ada titik temu dan permasalahan ini bisa selesai secara kekeluargaan. Namun, bilamana tidak bisa diselesaikan, ada kemungkinan perkara ini akan berlanjut sampai tingkat pengadilan," tegasnya.

Didik menilai, polisi seharusnya bisa dengan mudah melacak aliran dana dan memanggil ke-13 pemilik rekening tersebut untuk kepentingan penyelidikan. Menurutnya, nama-nama pemilik rekening tersebut tertera jelas dan data perbankan dapat dibuka demi hukum.

Terkait proses hukum yang berjalan, Didik menjelaskan bahwa awalnya terdapat Laporan Polisi (LP) di Polres Pangandaran mengenai dugaan penyebaran informasi menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik. Namun, sejak 8 Juni lalu, penanganan kasus tersebut telah

semuanya merupakan nasabah PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk atau BRI.

Didik menilai, polisi seharusnya bisa dengan mudah melacak aliran dana dan memanggil ke-13 pemilik rekening tersebut untuk kepentingan penyelidikan. Menurutnya, nama-nama pemilik rekening tersebut tertera jelas dan data perbankan dapat dibuka demi hukum.

Terkait proses hukum yang berjalan, Didik menjelaskan bahwa awalnya terdapat Laporan Polisi (LP) di Polres Pangandaran mengenai dugaan penyebaran informasi menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik. Namun, sejak 8 Juni lalu, penanganan kasus tersebut telah

Bupati Garut Ajak Masyarakat dan Pelaku Usaha Halaman 7

langsung hingga 31 Agustus 2026.

Komitmen Pemerintah Kabupaten Garut dalam mendukung program strategis nasional tersebut kembali ditunjukkan saat Bupati Abdusy Syukur Amin secara resmi menerima kedatangan petugas Sensus Ekonomi 2026 di Ruang Pamengkang, Kecamatan Garut Kota, Kabupaten Garut, Rabu (8/7/2026).

Dalam kesempatan tersebut, Bupati juga telah memberikan data yang diperlukan sebagai bagian dari pelaksanaan sensus. Menurutnya, keberhasilan Sensus Ekonomi

informasi kepada petugas sensus. Seluruh data yang disampaikan responden dijamin kerahasiaannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan hanya digunakan untuk kepentingan statistik.

Bupati juga berharap seluruh masyarakat Kabupaten Garut dapat memberikan dukungan penuh terhadap pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026. Menurutnya, data yang akurat akan memberikan gambaran nyata mengenai kondisi perekonomian daerah, sehingga pemerintah dapat menyusun program pembangunan

yang lebih tepat sasaran, efektif, dan berkelanjutan.

Sensus Ekonomi 2026 merupakan program nasional yang dilaksanakan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) untuk memperoleh data komprehensif mengenai kondisi dan perkembangan kegiatan ekonomi di Indonesia. Hasil sensus ini akan menjadi salah satu acuan penting dalam penyusunan kebijakan pemerintah, baik di tingkat pusat maupun daerah, guna mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

yang lebih tepat sasaran, efektif, dan berkelanjutan.

Sensus Ekonomi 2026 merupakan program nasional yang dilaksanakan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) untuk memperoleh data komprehensif mengenai kondisi dan perkembangan kegiatan ekonomi di Indonesia. Hasil sensus ini akan menjadi salah satu acuan penting dalam penyusunan kebijakan pemerintah, baik di tingkat pusat maupun daerah, guna mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

yang lebih tepat sasaran, efektif, dan berkelanjutan.

Sensus Ekonomi 2026 merupakan program nasional yang dilaksanakan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) untuk memperoleh data komprehensif mengenai kondisi dan perkembangan kegiatan ekonomi di Indonesia. Hasil sensus ini akan menjadi salah satu acuan penting dalam penyusunan kebijakan pemerintah, baik di tingkat pusat maupun daerah, guna mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

yang lebih tepat sasaran, efektif, dan berkelanjutan.

Sensus Ekonomi 2026 merupakan program nasional yang dilaksanakan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) untuk memperoleh data komprehensif mengenai kondisi dan perkembangan kegiatan ekonomi di Indonesia. Hasil sensus ini akan menjadi salah satu acuan penting dalam penyusunan kebijakan pemerintah, baik di tingkat pusat maupun daerah, guna mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

yang lebih tepat sasaran, efektif, dan berkelanjutan.

Sensus Ekonomi 2026 merupakan program nasional yang dilaksanakan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) untuk memperoleh data komprehensif mengenai kondisi dan perkembangan kegiatan ekonomi di Indonesia. Hasil sensus ini akan menjadi salah satu acuan penting dalam penyusunan kebijakan pemerintah, baik di tingkat pusat maupun daerah, guna mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Dorong Konsumsi Ikan dan Tekan Stunting Halaman 7

Disnakan Kabupaten Ciamis juga melakukan aksi nyata di lapangan.

Dalam kesempatan ini, Disnakan Ciamis membagikan 150 paket hasil olahan ikan secara langsung kepada para penerima manfaat.

Melalui pembagian paket olahan ini, diharapkan masyarakat khususnya para ibu dapat lebih kreatif dalam menyajikan menu berbahan dasar ikan yang disukai oleh anak-anak. Langkah ini menjadi bagian dari strategi besar Ka-

upaten Ciamis dalam mendorong peningkatan konsumsi ikan sekaligus menciptakan generasi yang sehat, cerdas dan bebas stunting.

Kepala Desa Jalatrang, Dadi Haryadi mengucapkan terima kasih yang seting-

gi-tingginya kepada Disnakan kabupaten Ciamis yang telah membantu dan mensosialisasikan Gemar Makan Ikan pada masyarakat Desa Jalatrang, semoga ilmu yang di sampaikan bermanfaat bagi warga. (Mamay)

yang lebih tepat sasaran, efektif, dan berkelanjutan.

Sensus Ekonomi 2026 merupakan program nasional yang dilaksanakan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) untuk memperoleh data komprehensif mengenai kondisi dan perkembangan kegiatan ekonomi di Indonesia. Hasil sensus ini akan menjadi salah satu acuan penting dalam penyusunan kebijakan pemerintah, baik di tingkat pusat maupun daerah, guna mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

yang lebih tepat sasaran, efektif, dan berkelanjutan.

Sensus Ekonomi 2026 merupakan program nasional yang dilaksanakan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) untuk memperoleh data komprehensif mengenai kondisi dan perkembangan kegiatan ekonomi di Indonesia. Hasil sensus ini akan menjadi salah satu acuan penting dalam penyusunan kebijakan pemerintah, baik di tingkat pusat maupun daerah, guna mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

yang lebih tepat sasaran, efektif, dan berkelanjutan.

Sensus Ekonomi 2026 merupakan program nasional yang dilaksanakan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) untuk memperoleh data komprehensif mengenai kondisi dan perkembangan kegiatan ekonomi di Indonesia. Hasil sensus ini akan menjadi salah satu acuan penting dalam penyusunan kebijakan pemerintah, baik di tingkat pusat maupun daerah, guna mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Tutup MTQ XXIII Provinsi Banten 2026 Halaman 7

Dimiyati kepada Bupati Tangerang Moch Maesyul Rasyid.

Dalam sambutannya, Dimiyati mengatakan, penyelenggaraan MTQ bukan sekadar ajang perlombaan membaca Al-Quran, tetapi menjadi momentum mempromosikan kebhinekaan dan persatuan bangsa.

"Inisiatif dari kita untuk membantu memproses persyaratannya agar mendapatkan bantuan tersebut. Tentu ini sedang berproses, mulai dari kelurahan hingga ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) untuk pengurusan surat keterangan kematian," pungkasnya. (Mamay)

yang lebih tepat sasaran, efektif, dan berkelanjutan.

Sensus Ekonomi 2026 merupakan program nasional yang dilaksanakan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) untuk memperoleh data komprehensif mengenai kondisi dan perkembangan kegiatan ekonomi di Indonesia. Hasil sensus ini akan menjadi salah satu acuan penting dalam penyusunan kebijakan pemerintah, baik di tingkat pusat maupun daerah, guna mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

yang lebih tepat sasaran, efektif, dan berkelanjutan.

Sensus Ekonomi 2026 merupakan program nasional yang dilaksanakan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) untuk memperoleh data komprehensif mengenai kondisi dan perkembangan kegiatan ekonomi di Indonesia. Hasil sensus ini akan menjadi salah satu acuan penting dalam penyusunan kebijakan pemerintah, baik di tingkat pusat maupun daerah, guna mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

yang lebih tepat sasaran, efektif, dan berkelanjutan.

Sensus Ekonomi 2026 merupakan program nasional yang dilaksanakan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) untuk memperoleh data komprehensif mengenai kondisi dan perkembangan kegiatan ekonomi di Indonesia. Hasil sensus ini akan menjadi salah satu acuan penting dalam penyusunan kebijakan pemerintah, baik di tingkat pusat maupun daerah, guna mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

yang lebih tepat sasaran, efektif, dan berkelanjutan.

Sensus Ekonomi 2026 merupakan program nasional yang dilaksanakan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) untuk memperoleh data komprehensif mengenai kondisi dan perkembangan kegiatan ekonomi di Indonesia. Hasil sensus ini akan menjadi salah satu acuan penting dalam penyusunan kebijakan pemerintah, baik di tingkat pusat maupun daerah, guna mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

yang lebih tepat sasaran, efektif, dan berkelanjutan.

Sensus Ekonomi 2026 merupakan program nasional yang dilaksanakan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) untuk memperoleh data komprehensif mengenai kondisi dan perkembangan kegiatan ekonomi di Indonesia. Hasil sensus ini akan menjadi salah satu acuan penting dalam penyusunan kebijakan pemerintah, baik di tingkat pusat maupun daerah, guna mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

yang lebih tepat sasaran, efektif, dan berkelanjutan.

Sensus Ekonomi 2026 merupakan program nasional yang dilaksanakan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) untuk memperoleh data komprehensif mengenai kondisi dan perkembangan kegiatan ekonomi di Indonesia. Hasil sensus ini akan menjadi salah satu acuan penting dalam penyusunan kebijakan pemerintah, baik di tingkat pusat maupun daerah, guna mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Tutup MTQ XXIII Provinsi Banten 2026 Halaman 7

Dimiyati juga mengajak seluruh kafilah untuk terus berlatih dan meningkatkan kemampuan. Menurutnya, semakin banyak penyelenggaraan festival dan kompetisi membaca Al-Qur'an akan semakin mendorong lahirnya qari dan qariah berprestasi.

"Kuncinya MTQ itu sebetulnya untuk melatih, untuk latihan. Maka perbanyak festival membaca Al-Qur'an. Semakin banyak festival, semakin banyak orang berlatih. Mudah-mudahan nanti MTQ nasional kita bisa lima besar," ujarnya.

yang lebih tepat sasaran, efektif, dan berkelanjutan.

Sensus Ekonomi 2026 merupakan program nasional yang dilaksanakan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) untuk memperoleh data komprehensif mengenai kondisi dan perkembangan kegiatan ekonomi di Indonesia. Hasil sensus ini akan menjadi salah satu acuan penting dalam penyusunan kebijakan pemerintah, baik di tingkat pusat maupun daerah, guna mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

yang lebih tepat sasaran, efektif, dan berkelanjutan.

Sensus Ekonomi 2026 merupakan program nasional yang dilaksanakan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) untuk memperoleh data komprehensif mengenai kondisi dan perkembangan kegiatan ekonomi di Indonesia. Hasil sensus ini akan menjadi salah satu acuan penting dalam penyusunan kebijakan pemerintah, baik di tingkat pusat maupun daerah, guna mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

yang lebih tepat sasaran, efektif, dan berkelanjutan.

Sensus Ekonomi 2026 merupakan program nasional yang dilaksanakan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) untuk memperoleh data komprehensif mengenai kondisi dan perkembangan kegiatan ekonomi di Indonesia. Hasil sensus ini akan menjadi salah satu acuan penting dalam penyusunan kebijakan pemerintah, baik di tingkat pusat maupun daerah, guna mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

yang lebih tepat sasaran, efektif, dan berkelanjutan.

Sensus Ekonomi 2026 merupakan program nasional yang dilaksanakan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) untuk memperoleh data komprehensif mengenai kondisi dan perkembangan kegiatan ekonomi di Indonesia. Hasil sensus ini akan menjadi salah satu acuan penting dalam penyusunan kebijakan pemerintah, baik di tingkat pusat maupun daerah, guna mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

yang lebih tepat sasaran, efektif, dan berkelanjutan.

Sensus Ekonomi 2026 merupakan program nasional yang dilaksanakan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) untuk memperoleh data komprehensif mengenai kondisi dan perkembangan kegiatan ekonomi di Indonesia. Hasil sensus ini akan menjadi salah satu acuan penting dalam penyusunan kebijakan pemerintah, baik di tingkat pusat maupun daerah, guna mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

yang lebih tepat sasaran, efektif, dan berkelanjutan.

Sensus Ekonomi 2026 merupakan program nasional yang dilaksanakan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) untuk memperoleh data komprehensif mengenai kondisi dan perkembangan kegiatan ekonomi di Indonesia. Hasil sensus ini akan menjadi salah satu acuan penting dalam penyusunan kebijakan pemerintah, baik di tingkat pusat maupun daerah, guna mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Tutup MTQ XXIII Provinsi Banten 2026 Halaman 7

Dimiyati juga mengajak seluruh kafilah untuk terus berlatih dan meningkatkan kemampuan. Menurutnya, semakin banyak penyelenggaraan festival dan kompetisi membaca Al-Qur'an akan semakin mendorong lahirnya qari dan qariah berprestasi.

"Kuncinya MTQ itu sebetulnya untuk melatih, untuk latihan. Maka perbanyak festival membaca Al-Qur'an. Semakin banyak festival, semakin banyak orang berlatih. Mudah-mudahan nanti MTQ nasional kita bisa lima besar," ujarnya.

yang lebih tepat sasaran, efektif, dan berkelanjutan.

Sensus Ekonomi 2026 merupakan program nasional yang dilaksanakan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) untuk memperoleh data komprehensif mengenai kondisi dan perkembangan kegiatan ekonomi di Indonesia. Hasil sensus ini akan menjadi salah satu acuan penting dalam penyusunan kebijakan pemerintah, baik di tingkat pusat maupun daerah, guna mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

yang lebih tepat sasaran, efektif, dan berkelanjutan.

Sensus Ekonomi 2026 merupakan program nasional yang dilaksanakan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) untuk memperoleh data komprehensif mengenai kondisi dan perkembangan kegiatan ekonomi di Indonesia. Hasil sensus ini akan menjadi salah satu acuan penting dalam penyusunan kebijakan pemerintah, baik di tingkat pusat maupun daerah, guna mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

yang lebih tepat sasaran, efektif, dan berkelanjutan.

Sensus Ekonomi 2026 merupakan program nasional yang dilaksanakan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) untuk memperoleh data komprehensif mengenai kondisi dan perkembangan kegiatan ekonomi di Indonesia. Hasil sensus ini akan menjadi salah satu acuan penting dalam penyusunan kebijakan pemerintah, baik di tingkat pusat maupun daerah, guna mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

yang lebih tepat sasaran, efektif, dan berkelanjutan.

Sensus Ekonomi 2026 merupakan program nasional yang dilaksanakan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) untuk memperoleh data komprehensif mengenai kondisi dan perkembangan kegiatan ekonomi di Indonesia. Hasil sensus ini akan menjadi salah satu acuan penting dalam penyusunan kebijakan pemerintah, baik di tingkat pusat maupun daerah, guna mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

yang lebih tepat sasaran, efektif, dan berkelanjutan.

Sensus Ekonomi 2026 merupakan program nasional yang dilaksanakan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) untuk memperoleh data komprehensif mengenai kondisi dan perkembangan kegiatan ekonomi di Indonesia. Hasil sensus ini akan menjadi salah satu acuan penting dalam penyusunan kebijakan pemerintah, baik di tingkat pusat maupun daerah, guna mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

yang lebih tepat sasaran, efektif, dan berkelanjutan.

Sensus Ekonomi 2026 merupakan program nasional yang dilaksanakan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) untuk memperoleh data komprehensif mengenai kondisi dan perkembangan kegiatan ekonomi di Indonesia. Hasil sensus ini akan menjadi salah satu acuan penting dalam penyusunan kebijakan pemerintah, baik di tingkat pusat maupun daerah, guna mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Tutup MTQ XXIII Provinsi Banten 2026 Halaman 7

Dimiyati juga mengajak seluruh kafilah untuk terus berlatih dan meningkatkan kemampuan. Menurutnya, semakin banyak penyelenggaraan festival dan kompetisi membaca Al-Qur'an akan semakin mendorong lahirnya qari dan qariah berprestasi.

"Kuncinya MTQ itu sebetulnya untuk melatih, untuk latihan. Maka perbanyak festival membaca Al-Qur'an. Semakin banyak festival, semakin banyak orang berlatih. Mudah-mudahan nanti MTQ nasional kita bisa lima besar," ujarnya.

yang lebih tepat sasaran, efektif, dan berkelanjutan.

Sensus Ekonomi 2026 merupakan program nasional yang dilaksanakan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) untuk memperoleh data komprehensif mengenai kondisi dan perkembangan kegiatan ekonomi di Indonesia. Hasil sensus ini akan menjadi salah satu acuan penting dalam penyusunan kebijakan pemerintah, baik di tingkat pusat maupun daerah, guna mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

yang lebih tepat sasaran, efektif, dan berkelanjutan.

Sensus Ekonomi 2026 merupakan program nasional yang dilaksanakan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) untuk memperoleh data komprehensif mengenai kondisi dan perkembangan kegiatan ekonomi di Indonesia. Hasil sensus ini akan menjadi salah satu acuan penting dalam penyusunan kebijakan pemerintah, baik di tingkat pusat maupun daerah, guna mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

yang lebih tepat sasaran, efektif, dan berkelanjutan.

Sensus Ekonomi 2026 merupakan program nasional yang dilaksanakan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) untuk memperoleh data komprehensif mengenai kondisi dan perkembangan kegiatan ekonomi di Indonesia. Hasil sensus ini akan menjadi salah satu acuan penting dalam penyusunan kebijakan pemerintah, baik di tingkat pusat maupun daerah, guna mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

yang lebih tepat sasaran, efektif, dan berkelanjutan.

Sensus Ekonomi 2026 merupakan program nasional yang dilaksanakan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) untuk memperoleh data komprehensif mengenai kondisi dan perkembangan kegiatan ekonomi di Indonesia. Hasil sensus ini akan menjadi salah satu acuan penting dalam penyusunan kebijakan pemerintah, baik di tingkat pusat maupun daerah, guna mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

yang lebih tepat sasaran, efektif, dan berkelanjutan.

Sensus Ekonomi 2026 merupakan program nasional yang dilaksanakan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) untuk memperoleh data komprehensif mengenai kondisi dan perkembangan kegiatan ekonomi di Indonesia. Hasil sensus ini akan menjadi salah satu acuan penting dalam penyusunan kebijakan pemerintah, baik di tingkat pusat maupun daerah, guna mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

yang lebih tepat sasaran, efektif, dan berkelanjutan.

Sensus Ekonomi 2026 merupakan program nasional yang dilaksanakan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) untuk memperoleh data komprehensif mengenai kondisi dan perkembangan kegiatan ekonomi di Indonesia. Hasil sensus ini akan menjadi salah satu acuan penting dalam penyusunan kebijakan pemerintah, baik di tingkat pusat maupun daerah, guna mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Bupati Simalungun Jemput Bola, Hadirkan Pelayanan Publik Terpadu dan Salurkan Bantuan di Tanah Jawa



Bupati Simalungun dan sejumlah perangkat daerah gelar layanan publik terpadu di Nagori Totap Majawa. (ist)

Simalungun, Jaya Pos
Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Simalungun menggelar pelayanan publik terpadu di Nagori Totap Majawa, Kecamatan Tanah Jawa, Sumatera Utara, Kamis (9/7/2026). Program jemput bola ini menjadi upaya pemerintah mendekati layanan kepada masyarakat sekaligus meninjau langsung pelaksanaan pembangunan di tingkat nagori.

Kegiatan tersebut dipimpin langsung Bupati Simalungun, Dr. H. Anton Achmad Saragih, didampingi kepala pimpinan perangkat daerah.

Dalam kegiatan itu, masyarakat mendapat berbagai layanan secara gratis, mulai dari administrasi kependudukan, pelayanan BPJS Kesehatan, Keluarga Berencana (KB), hingga layanan sosial lainnya. Warga juga dapat memanfaatkan pemeriksaan kesehatan meliputi cek tekanan darah, gula darah, kolesterol, asam urat, serta konsultasi medis bersama tenaga kesehatan dari Puskesmas

Marubun Jaya hanya dengan membawa KTP atau Kartu Keluarga.

Untuk membantu masyarakat menghadapi kebutuhan pokok, Dinas Perindustrian dan Perdagangan menggelar pasar murah dengan menyediakan 1 ton beras, 360 liter minyak goreng, dan 100 papan telur. Sementara itu, Dinas Sosial menyalurkan bantuan paket sembako kepada warga yang membutuhkan.

Pada kesempatan tersebut, Bupati Anton Achmad Saragih juga menyerahkan bantuan sembako serta alat pertanian berupa hand traktor dan corn sheller mobile kepada kelompok tani di Nagori Totap Majawa.

Kehadiran berbagai layanan tersebut disambut antusias masyarakat karena mereka tidak lagi harus datang ke ibu kota kecamatan maupun kabupaten untuk mengurus berbagai keperluan administrasi dan pelayanan pemerintah.

"Saya senang melihat antusias masyarakat. Ini men-

jadi semangat bagi kami untuk terus hadir dan mendengar langsung kebutuhan warga," kata Bupati.

Bupati juga mengingatkan masyarakat untuk menjaga kesehatan, terutama dari ancaman penyakit tidak menular seperti hipertensi dan diabetes. Selain itu, ia menegaskan komitmen pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan lansia serta mengajak seluruh keluarga berperan aktif melindungi generasi muda dari penyalahgunaan narkoba.

Dalam kesempatan itu, Bupati memaparkan sejumlah program pembangunan yang telah disiapkan Pemkab Simalungun di Kecamatan Tanah Jawa.

Di sektor infrastruktur, pemerintah mengalokasikan anggaran untuk rekonstruksi sejumlah ruas jalan, di antaranya Simpang Nagojor-Nagojor senilai Rp5,6 miliar, Jalan Nagori Totap Majawa Rp400 juta, Nagori Baja Dolok Rp400 juta, Simpang Preman Rp400 juta, Nagori Parbalogan Rp200 juta, Totap Majawa Rp200 juta, Maru-

bun Jaya-Saropah Rp200 juta, Balimbangan-Simpang Tangsi Rp200 juta, Bayu Bagasan Dusun II Rp400 juta, Huta I Ujung Mulia Nagori Muara Mulia Rp200 juta, Bahkisat/Pendowo Rp400 juta, Kampung Melayu Kelurahan Tanah Jawa Rp400 juta, Marubun Jaya Simpang Leto Rp400 juta, Balimbangan Rp400 juta, serta pembangunan pengaman jalan di Nagori Maligas Tengah senilai Rp400 juta.

Pada sektor sumber daya air dan pertanian, Pemkab Simalungun menganggarkan rehabilitasi irigasi DI Bah Hilang sebesar Rp1,5 miliar, DI Situmpul Rp1 miliar, pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Maligas Tengah Rp2,5 miliar, serta bantuan alat dan mesin pertanian bagi sejumlah kelompok tani.

Sementara di bidang pendidikan dan kesehatan, pemerintah mengalokasikan pembangunan sarana dan prasarana SMP Negeri 3 Maligas Tengah senilai Rp399,9 juta, revitalisasi Puskesmas

Pembantu Bayu Bagasan Rp200 juta, serta revitalisasi SD Negeri 091559 Banua sebesar Rp979,9 juta.

Camat Tanah Jawa Andi Supandri bersama Pangulu Nagori Totap Majawa Martua Sihotang mengapresiasi kunjungan Bupati beserta rombongan yang dinilai membawa manfaat langsung bagi masyarakat.

Tokoh masyarakat Edi Suwitno juga menyampaikan apresiasi atas perhatian pemerintah. Ia berharap perbaikan jalan di Maligas Tengah dapat segera direalisasikan, termasuk dukungan legalitas bagi lembaga sosial pembina anak yatim di wilayah tersebut. Ia juga mengapresiasi kinerja Penjabat Pangulu yang dinilai tetap aktif melayani masyarakat.

Melalui kegiatan jemput bola ini, Pemkab Simalungun berharap sinergi antara pemerintah dan masyarakat semakin kuat sehingga pembangunan dapat berjalan merata dan memberikan manfaat nyata bagi seluruh warga. (Isnani)

Andrew T. Panjaitan Terpilih Secara Aklamasi Pimpin DPC PJS Kota Pematangsiantar Periode 2026-2027



T. Panjaitan, S.T. resmi terpilih secara aklamasi sebagai Ketua Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Pro Jurnalisme Siber (PJS) Kota Pematangsiantar periode 2026-2027. (Foto/RD)

Pematangsiantar, Jaya Pos

Andrew T. Panjaitan, S.T., resmi terpilih secara aklamasi sebagai Ketua Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Pro Jurnalisme Siber (PJS) Kota Pematangsiantar periode 2026-2027 dalam Musyawarah Cabang (Muscab) II yang berlangsung di Gedung Ruang Data Sekretariat Pemerintah Kota Pematangsiantar, Selasa (7/7/2026).

Keputusan tersebut diambil secara bulat oleh 30 peserta Muscab yang memiliki hak suara. Seluruh peserta sepakat memberikan mandat kepada Andrew untuk memimpin organisasi profesi jurnalis tersebut selama satu periode ke depan.

Muscab II DPC PJS Kota Pematangsiantar turut dihadiri perwakilan Pemerintah Kota Pematangsiantar, Polres Pematangsiantar, Kejaksaan Negeri Pematangsiantar, PLN UP3 Pematangsiantar yang diwakili PLN ULP Siantar Kota, jajaran DPD PJS Sumatera Utara, pengurus DPC PJS Kabupaten Simalungun, Kota Tebing Tinggi, Kabupaten Tapanuli Tengah, dan Kota Sibolga, pimpinan organisasi pers, organisasi perusahaannya media, perwakilan Anggota DPD RI Pdt. Penrad Siagian, S.Th., insan pers, serta sejumlah tamu undangan lainnya.

Dalam pidato perdananya sebagai ketua terpilih, Andrew menyampaikan bahwa amanah yang diberikan kepadanya merupakan hasil musyawarah dan wujud kepercayaan seluruh anggota, bukan kemenangan individu.

"Saya menerima amanah ini bukan sebagai kemenangan pribadi, melainkan kemenangan musyawarah, kemenangan persatuan, dan kemenangan organisasi yang kita cintai bersama. Jabatan bukanlah kemuliaan yang harus dibanggakan, tetapi tanggung jawab yang harus dipertanggungjawabkan," ujar Andrew.

Ia juga menyampaikan apresiasi kepada seluruh peserta Muscab, panitia pelaksana, pengurus periode sebelumnya, Pemerintah Kota Pematangsiantar, DPD PJS Sumatera Utara, para mitra kerja, serta seluruh pihak yang telah mendukung terselenggaranya Muscab II dengan baik.

Mengusung tema "Meneguhkan Integritas dan Kompetensi untuk PJS yang Mandiri, Profesional, dan Diakui", Andrew menegaskan komitmennya untuk memperkuat kapasitas organisasi melalui peningkatan integritas dan kompetensi anggota, sekaligus mendorong lahirnya karya-karya jurnalistik yang profesional, berkualitas, bertanggung jawab, serta berorientasi pada kepentingan publik.

Menurutnya, DPC PJS Kota Pematangsiantar juga akan terus memperkuat perannya sebagai mitra strategis Pemerintah Kota Pematangsiantar dalam mendukung pembangunan daerah melalui penyampaian informasi yang akurat, berimbang, dan dapat dipertanggungjawabkan, dengan tetap menjunjung tinggi independensi pers serta berpedoman pada Kode Etik Jurnalistik dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Andrew turut mengajak seluruh pengurus dan anggota untuk mengakhiri dinamika yang terjadi selama proses Muscab dan kembali mempererat kebersamaan demi kemajuan organisasi.

Ia mengungkapkan, dalam waktu dekat DPC PJS Kota Pematangsiantar akan mengikuti Musyawarah Nasional (Munas) III PJS di Jakarta yang dirangkaikan dengan pelantikan pengurus DPC PJS dari berbagai daerah di Indonesia.

Menurut Andrew, keikutsertaan dalam agenda nasional tersebut menjadi momentum penting untuk membawa nama baik Kota Pematangsiantar sekaligus memperkuat jaringan organisasi serta meningkatkan profesionalisme insan pers di era digital.

Menutup sambutannya, Andrew mengajak seluruh anggota menjadikan Muscab II sebagai titik awal pengabdian baru bagi organisasi dan masyarakat.

Muscab II DPC PJS Kota Pematangsiantar diharapkan menjadi tonggak konsolidasi organisasi dalam memperkuat profesionalisme, kompetensi, dan soliditas anggota, sehingga mampu memberikan kontribusi nyata bagi perkembangan dunia pers yang independen, berkualitas, dan bertanggung jawab di Kota Pematangsiantar maupun Sumatera Utara. (RD)

Sidang Dokter Tifa Digelar, Eksepsi 37 Halaman Disiapkan

Jakarta, Jaya Pos

Sidang lanjutan perkara dugaan pencemaran nama baik terkait tuduhan ijazah Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) kembali digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Timur, Kamis (9/7/2026). Dalam agenda persidangan tersebut, terdakwa Tifauzia Tyassuma atau dokter Tifa dijadwalkan membacakan eksepsi atau nota keberatan atas dakwaan yang diajukan Jaksa Penuntut Umum (JPU).

Dokter Tifa tiba di Pengadilan Negeri Jakarta Timur sekitar pukul 08.46 WIB didampingi tim kuasa hukumnya. Kedatangannya disambut sejumlah pendukung yang meneriakkan yel-yel penyemangat saat ia memasuki halaman pengadilan menuju

ruang sidang. "Semangat dokter Tifa, lawan Jokowi," teriak para pendukung di halaman Pengadilan Negeri Jakarta Timur.

Dokter Tifa tampak membawa dokumen eksepsi yang akan disampaikan sebagai bentuk keberatan terhadap dakwaan JPU. Ia mengungkapkan bahwa nota keberatan tersebut telah dipersiapkan secara matang.

"Kami sudah mempersiapkan 37 halaman, ya, nota perlawanan. Insyaallah nanti dibacakan oleh para advokat saya," ujar dokter Tifa.

Selain didampingi tim kuasa hukum, sidang juga dihadiri Roy Suryo yang datang untuk memberikan dukungan moril kepada dokter Tifa.

"Kita dukung dokter Tifa



Tifauzia Tyassuma (foto Dokpri)

agar sidang lancar," kata Roy Suryo.

Sebelumnya, dalam surat dakwaan, JPU menyebut dokter Tifa diduga melakukan pencemaran nama baik melalui unggahan di media sosial yang menuding ijazah sarjana

(S-1) milik Presiden ke-7 RI Joko Widodo palsu.

Perkara tersebut bermula pada 26 Maret 2025 ketika ajudan Jokowi, Syarif Muhammad, memperlihatkan kepada Jokowi tiga unggahan di media sosial yang memuat tuduhan mengenai keaslian ijazah S-1 miliknya. Salah satu unggahan itu berasal dari akun dokter Tifa.

Dalam unggahannya, dokter Tifa menyoroti sejumlah hal yang menurutnya merupakan kejanggalan pada ijazah S-1 Jokowi, mulai dari sampul ijazah, foto wisuda, buku alumni Universitas Gadjah Mada (UGM), hingga pernyataan Jokowi mengenai Profesor Achmad Soemitro sebagai dosen pembimbingnya.

Jaksa menilai unggahan tersebut telah menimbulkan kerugian immateriil bagi Jokowi karena dianggap mencemarkan nama baik serta memicu munculnya tuduhan serupa dari pihak lain. (Michael J Manurung)

PKFI Kota Mojokerto Dorong Seluruh Klinik Segera Tuntaskan Akreditasi dan Terapkan Rekam Medis Elektronik

Mojokerto, Jaya Pos

Perhimpunan Klinik dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Indonesia (PKFI) Kota Mojokerto menggelar pertemuan rutin bersama para pengelola klinik kesehatan dan klinik kecantikan di Resto Latar, Jalan Empunala, Kota Mojokerto, Rabu (8/7/2026).

Pertemuan tersebut menjadi forum koordinasi sekaligus penguatan kapasitas bagi seluruh anggota PKFI dalam menghadapi berbagai regulasi pemerintah, khususnya terkait kewajiban akreditasi klinik serta penerapan Rekam

Medis Elektronik (RME).

Ketua PKFI Kota Mojokerto, dr. Alfian, menegaskan bahwa seluruh klinik yang telah beroperasi sekitar dua tahun sudah seharusnya segera memenuhi ketentuan akreditasi sebagaimana diatur oleh pemerintah. Menurutnya, akreditasi merupakan bagian penting dalam menjamin mutu pelayanan kesehatan dan keselamatan pasien.

Ia menjelaskan, tahapan awal yang harus dipersiapkan meliputi kelengkapan dokumen perizinan dan berbagai persyaratan administrasi lainnya. Selain itu, pengelola



Pertemuan anggota PKFI Kota Mojokerto di resto latar jalan Empunala (Foto/doc.Totok)

klinik juga disarankan menggunakan jasa konsultan yang telah berpengalaman di bidang akreditasi agar proses dapat berjalan lebih efektif.

Menurutnya, klinik juga wajib menjalin kerja sama

melalui nota kesepahaman (MoU) dengan rumah sakit pemerintah maupun swasta yang memiliki layanan ambulans sebagai bagian dari sistem rujukan pasien. Tidak hanya itu, kerja sama den-

gan instansi atau perusahaan yang menyediakan layanan pemadam kebakaran juga menjadi salah satu aspek yang perlu dipenuhi dalam persyaratan akreditasi.

Selain membahas akreditasi, PKFI Kota Mojokerto juga mendorong seluruh klinik untuk segera menerapkan sistem Rekam Medis Elektronik (RME) sebagai bagian dari transformasi digital pelayanan kesehatan.

Dr. Alfian menyampaikan bahwa penggunaan RME akan mempermudah penyimpanan, pengelolaan, serta akses riwayat kese-

hatan pasien secara elektronik sehingga pelayanan menjadi lebih cepat, akurat, dan terdokumentasi dengan baik.

Pertemuan tersebut dihadiri sekitar 13 perwakilan dari berbagai klinik kesehatan dan klinik kecantikan yang tersebar di wilayah Kota Mojokerto.

Suasana kekeluargaan dan kebersamaan tampak mewarnai jalannya kegiatan. Para anggota PKFI saling bertukar pengalaman serta berdiskusi mengenai berbagai tantangan yang dihadapi dalam pengelolaan fasilitas pelayanan kesehatan, mu-

lai dari persoalan perizinan, proses akreditasi, hingga implementasi sistem digital.

Semangat keguyuban yang terbangun di lingkungan PKFI Kota Mojokerto dinilai menjadi modal penting dalam meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan kepada masyarakat. Melalui koordinasi yang berkelanjutan, organisasi ini berharap seluruh anggotanya dapat memenuhi standar pelayanan yang ditetapkan pemerintah sekaligus mampu beradaptasi dengan perkembangan teknologi di sektor kesehatan. (Tok)